

Agenda Kerja Sekretaris Daerah Juni 2026						
Tanggal	Agenda	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Tautan	
01/06	Sekda	Template	Template Mei			
01/06	Sekda	pOSTER hARLAH pANCASILA	Persatuan tidak selalu lahir dari hal-hal besar, tetapi justru tumbuh dari kesediaan untuk mendengar, memahami, dan menghadirkan pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat. Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa nilai-nilai dasar bangsa tidak berhenti sebagai slogan, tetapi hadir dalam cara kerja pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, Pancasila tercermin dalam pelayanan publik yang adil, sikap saling menghargai perbedaan, kehati-hatian dalam merespons aspirasi masyarakat, serta kebijaksanaan dalam menggunakan ruang digital. Hal-hal sederhana inilah yang menjaga kepercayaan dan kebersamaan tetap terawat di tengah dinamika yang terus berkembang. Di lingkungan pemerintahan, nilai tersebut menjadi landasan dalam membangun birokrasi yang responsif, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga panduan dalam merawat harmoni, memperkuat persatuan, dan memastikan Indonesia tetap tumbuh sebagai bangsa yang damai dan berkeadaban. #HariLahirPancasila #Pancasila #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan		https://www.instagram.com/p/DZBifcnmE0g/?img_index=5	
01/06	Sekda	pOSTER hARLAH pANCASILA			https://www.instagram.com/p/DZBifcnmE0g/?img_index=5	

	01/06	Sekda	hARLAH pANCASILA	Persatuan sering kali tidak dibangun melalui hal-hal besar, melainkan dari sikap sederhana yang dilakukan setiap hari: saling menghormati, mau mendengar, dan hadir melayani tanpa membedakan. Senin (1/6/2026), Sekda Armunanto mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Setda Grobogan. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wakil Bupati Grobogan Bapak H. Sugeng Prasetyo. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menegaskan tema Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia." Tema tersebut mengingatkan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Di tengah keberagaman yang dimiliki Indonesia, nilai-nilai persatuan, kemanusiaan, gotong royong, dan keadilan sosial menjadi kekuatan yang menjaga bangsa tetap kokoh. Bagi pemerintah daerah, semangat Pancasila juga menjadi landasan dalam menghadirkan pelayanan publik yang adil, menjaga kerukunan, serta memastikan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Karena pada akhirnya, Pancasila tidak hanya hidup dalam upacara atau peringatan tahunan. Nilai-nilainya hadir dalam cara kita memperlakukan sesama, menyikapi perbedaan, dan bekerja bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Selamat Hari Lahir Pancasila 2026. #HariLahirPancasila #Pancasila #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan	https://www.instagram.com/p/DZBsF9vGF5W/?img_index=1
--	-------	-------	------------------	--	---

	02/06	Sekda	LP2B	Ketersediaan lahan pertanian tidak hanya berkaitan dengan aktivitas bertani hari ini, tetapi juga menyangkut kemampuan daerah menjaga ketahanan pangan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat di masa mendatang. Selasa (2/6/2026), Sekda Anang Armunanto mengikuti rapat verifikasi usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara daring dari Ruang Rapat Sekda. Rapat turut dihadiri BPPKAD, Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, DPMPSTP, Kantor ATR/BPN Kabupaten Grobogan, serta pihak terkait lainnya. Pembahasan dilakukan sebagai bagian dari proses verifikasi dan penyelarasan data lahan pertanian yang menjadi prioritas perlindungan pemerintah. Langkah ini sejalan dengan upaya menjaga keberadaan lahan sawah produktif agar tetap dapat mendukung kebutuhan pangan di tengah perkembangan pembangunan dan kebutuhan pemanfaatan ruang yang terus meningkat. Selain membahas usulan LP2B, pertemuan juga menjadi ruang koordinasi untuk memastikan kesesuaian data lahan pertanian antara pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang dan pengambilan kebijakan yang lebih terukur. Bagi Kabupaten Grobogan yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Tengah, perlindungan lahan pertanian memiliki arti penting. Tidak hanya untuk menjaga produksi pangan, tetapi juga mendukung keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian. Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, keseimbangan antara pemanfaatan ruang dan perlindungan lahan produktif menjadi hal yang perlu dijaga agar kebutuhan hari ini dapat dipenuhi tanpa mengurangi kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan di masa mendatang. Melalui proses verifikasi dan penyelarasan data yang dilakukan bersama, diharapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian dapat berjalan lebih tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, baik oleh petani maupun masyarakat luas melalui terjaganya ketahanan pangan daerah. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #lp2b #ketahananpangan	https://www.instagram.com/p/DZFdkOGGFxm/?img_index=1
--	-------	-------	------	---	--

	02/06	Sekda	Senam Tera	Kesehatan dan kebersamaan sering kali tumbuh dari kegiatan yang sederhana. Ketika masyarakat berkumpul dan berolahraga bersama, yang terbangun bukan hanya kebugaran fisik, tetapi juga kedekatan sosial di tengah kehidupan sehari-hari. Selasa (2/6/2026), Sekda Anang Armunanto mendampingi Wakil Bupati Grobogan Bapak H. Sugeng Prasetyo mengikuti Senam Sehat Tera Bersama di Alun-Alun Purwodadi dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila. Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Disporabudpar tersebut dihadiri unsur Forkopimda dan diikuti masyarakat dari berbagai kalangan. Selain menjadi sarana menjaga kesehatan, kegiatan ini juga menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul dan berinteraksi dalam suasana yang santai dan penuh semangat. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga hadir dalam kehidupan sehari-hari melalui kebersamaan, sikap saling menghargai, dan semangat hidup berdampingan di tengah keberagaman. Dari kegiatan sederhana seperti ini, tumbuh kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan sekaligus memperkuat kebersamaan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #harilahirpancasila #senamtera		https://www.instagram.com/p/DZE1CEgSOpr/
	02/06	Sekda	Loka POM	Tidak semua penyakit datang tanpa peringatan. Sebagian dapat dicegah melalui pengetahuan, kesadaran, dan langkah perlindungan yang dilakukan lebih awal. Selasa (2/6/2026), Sekda Anang Armunanto menerima kunjungan kerja Kepala Loka POM di Grobogan Ronald Hatoguan Manik di Ruang Kerja Sekda. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi terkait rencana pelaksanaan Gerakan Nasional Sejuta Vaksin HPV di Kabupaten Grobogan, sebuah program kolaborasi antara KORPRI dan BPOM yang bertujuan mendukung upaya pencegahan kanker serviks pada perempuan Indonesia. Program ini awalnya ditujukan bagi ASN perempuan, namun dalam perkembangannya diperluas untuk keluarga ASN dan masyarakat umum sesuai sasaran usia vaksinasi yang telah ditetapkan. Kanker serviks masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi kualitas hidup perempuan dan keluarganya. Karena itu, upaya pencegahan melalui edukasi dan vaksinasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat. Melalui koordinasi yang dilakukan bersama berbagai pihak, diharapkan program ini dapat memberikan pilihan dan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk melakukan langkah pencegahan sejak dini. Pada akhirnya, menjaga kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pengobatan saat sakit, tetapi juga tentang sejauh mana masyarakat memiliki kesempatan untuk mengenali risiko dan mengambil langkah pencegahan lebih awal. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #lokapom #vaksinhpv		https://www.instagram.com/p/DZGdhQKEoZX/?img_index=1

	02/06	Sekda	Duta Bahasa	Setiap anak muda memiliki kesempatan untuk berkembang dan menunjukkan kemampuannya. Yang sering kali dibutuhkan adalah ruang untuk belajar, keberanian untuk mencoba, dan dukungan agar potensi tersebut dapat tumbuh dengan baik. Selasa (2/6/2026), Sekda Anang Armunanto menerima Ima Nur Diana, finalis Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 asal Kabupaten Grobogan, di Ruang Kerja Sekda. Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah menjadi ajang pengembangan generasi muda dalam bidang kebahasaan, literasi, dan pelestarian budaya. Sebelum mencapai tahap final, peserta dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan mengikuti serangkaian seleksi administrasi, penulisan esai, serta wawancara yang mencakup kemampuan bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa Jawa, dan penilaian krida. Dari 73 semifinalis yang mengikuti tahapan tersebut, terpilih 20 finalis yang berhak melanjutkan ke tahap pembekalan dan final raya, termasuk Ima Nur Diana dari Kabupaten Grobogan. Capaian ini menunjukkan bahwa generasi muda Grobogan memiliki kemampuan dan daya saing untuk tampil di tingkat yang lebih luas. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi pelajar dan mahasiswa lainnya untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki. Setiap prestasi yang diraih generasi muda menunjukkan bahwa potensi anak-anak daerah dapat berkembang ketika memperoleh kesempatan, ruang belajar, dan dukungan yang tepat. Karena itu, berbagai ruang pengembangan diri yang terbuka bagi generasi muda perlu terus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya, keberhasilan seperti ini bukan hanya tentang sebuah pencapaian pribadi, tetapi juga tentang hadirnya inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk terus belajar, mengasah kemampuan, dan berani mengambil kesempatan yang terbuka di hadapan mereka. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #dutabahasa #generasimuda	https://www.instagram.com/p/DZGovuuGAiA/?img_index=1
--	-------	-------	-------------	--	---

	02/06	Sekda	Bersepeda day	Di tengah aktivitas yang semakin padat, menyediakan waktu untuk bergerak menjadi hal yang kadang mudah terlewatkan. Padahal, langkah-langkah sederhana untuk menjaga kesehatan sering kali dapat dilakukan melalui kebiasaan sehari-hari. Bersepeda menjadi salah satu aktivitas yang tidak hanya bermanfaat bagi kebugaran tubuh, tetapi juga membantu mengurangi emisi dan mendukung lingkungan yang lebih sehat. Peringatan Hari Sepeda Sedunia setiap 3 Juni menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya gaya hidup aktif sekaligus mendorong penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Selain memberi manfaat bagi kesehatan fisik dan mental, bersepeda juga menghadirkan cara yang sederhana untuk menikmati lingkungan sekitar, mempererat kebersamaan, dan membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas hidup. Pada akhirnya, menjaga kesehatan dan lingkungan tidak selalu membutuhkan langkah yang rumit. Kebiasaan sederhana seperti bersepeda dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. #HariSepedaSedunia #WorldBicycleDay #sekdagrobogan #setdagrobogan #pemkabgrobogan		
	03/06	Sekda	Bersepeda day	Tidak semua pilihan yang baik memberikan manfaat hanya untuk diri sendiri. Sebagian di antaranya juga membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Bersepeda menjadi salah satu contohnya. Selain membantu menjaga kebugaran tubuh, bersepeda juga dapat mengurangi emisi dan konsumsi bahan bakar, sehingga mendukung lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Di tengah aktivitas yang semakin padat, bersepeda dapat menjadi alternatif untuk tetap aktif bergerak sekaligus menikmati perjalanan. Peringatan Hari Sepeda Sedunia setiap 3 Juni menjadi momentum untuk mengingat kembali bahwa transportasi sederhana ini memiliki manfaat yang luas, baik bagi kesehatan, lingkungan, maupun kualitas hidup masyarakat. Sejalan dengan semangat tersebut, transformasi budaya kerja ASN juga mulai mendorong pola aktivitas yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan. Salah satunya melalui penyesuaian penggunaan moda transportasi sesuai jarak tempuh, termasuk mendorong pemanfaatan sepeda bagi ASN yang memungkinkan untuk melakukannya. Selain mendukung pengendalian konsumsi bahan bakar, kebiasaan ini juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang lebih adaptif terhadap tantangan lingkungan dan kebutuhan masa depan. Karena menjaga kesehatan dan lingkungan tidak selalu membutuhkan langkah yang rumit. Terkadang, perubahan dapat dimulai dari pilihan sederhana yang dilakukan setiap hari. #HariSepedaSedunia #WorldBicycleDay #sekdagrobogan #setdagrobogan #pemkabgrobogan		https://www.instagram.com/p/DZG9VlwmlHv/?img_index=1

	03/06	Sekda	Bersepeda day			https://www.instagram.com/p/DZG9VlwmlHv/?img_index=1
	03/06	Sekda	nipa psc	Layanan kegawatdaruratan yang cepat tidak hanya bergantung pada kesiapan petugas di lapangan, tetapi juga pada bagaimana sistem dan koordinasi antarinstansi dapat berjalan dengan baik saat dibutuhkan. Karena itu, upaya peningkatan layanan terus dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh bantuan secara lebih cepat, tepat, dan terhubung ketika menghadapi kondisi darurat. Rabu (3/6/2026), Sekda Anang Armunanto mengikuti rapat koordinasi secara daring bersama PT Beomho IT terkait tindak lanjut program hibah Smart City dari Pemerintah Korea Selatan. Rapat diikuti Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, BPPKAD, Bapperida, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DPUPR, Diskominfo, serta pihak terkait lainnya. Program tersebut merupakan tindak lanjut atas terpilihnya usulan pengembangan Smart PSC 119 Kabupaten Grobogan dalam program hibah teknologi Smart City yang didukung Pemerintah Korea Selatan melalui skema NIPA (National IT Industry Promotion Agency). Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah aspek pengembangan layanan, mulai dari layanan panggilan darurat (emergency call), keterhubungan data antarinstansi terkait, hingga aplikasi pendukung layanan ambulans. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebutuhan teknis dan dukungan lintas sektor agar pengembangan layanan dapat berjalan secara terpadu. Keterhubungan antarlayanan tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat penyampaian informasi, koordinasi petugas, dan mobilisasi layanan ambulans ketika terjadi kondisi darurat yang membutuhkan penanganan segera. Pada akhirnya, pengembangan sistem seperti ini diarahkan untuk mendukung pelayanan yang semakin responsif, sehingga masyarakat dapat memperoleh bantuan lebih cepat ketika menghadapi situasi darurat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #smartcity #psc119		https://www.instagram.com/p/DZHwwGhGAav/?img_index=1

	03/06	Sekda	GAE	Pertanian tidak hanya berbicara tentang hasil panen. Di baliknya ada kerja keras para petani yang menjaga ketersediaan pangan, menghadapi perubahan cuaca, biaya produksi, hingga tantangan pasar. Karena itu, kemajuan sektor pertanian tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman, tetapi juga perlu didukung inovasi, teknologi, dan ruang belajar yang membuka peluang baru bagi petani untuk berkembang. Rabu (3/6/2026), Sekda Anang Armunanto menghadiri pembukaan Grobogan Agro Expo (GAE) VIII Tahun 2026 yang digelar pada 3–7 Juni 2026 dengan tema "Mendukung Keberlanjutan Swasembada Pangan Melalui Smart Farming." Membuka kegiatan tersebut, Bupati Grobogan Bapak Setyo Hadi menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan GAE VIII dan mengingatkan bahwa petani merupakan profesi yang mulia karena berperan penting dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Menurutnya, GAE VIII menjadi ruang untuk mempertemukan petani dengan peluang, pengetahuan, dan teknologi yang dapat mendukung kemajuan sektor pertanian. Melalui kegiatan ini, generasi muda juga didorong untuk melihat pertanian sebagai sektor yang memiliki prospek. Dari ruang belajar tersebut, diharapkan lahir ide, inovasi, serta peluang usaha baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat perekonomian daerah. Selama lima hari pelaksanaan, masyarakat dapat melihat berbagai inovasi melalui pameran teknologi pertanian, demplot varietas unggul, serta teknologi pendukung budidaya modern. Bimbingan teknis, temu usaha, dan diskusi pertanian juga menjadi sarana berbagi pengetahuan bagi petani dan pelaku usaha. GAE VIII juga menghadirkan pameran UMKM dan produk olahan pertanian lokal yang melibatkan petani, pelaku UMKM, dan Kelompok Wanita Tani. Kegiatan ini diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi sekaligus memperluas akses pasar bagi produk pertanian daerah. Pada akhirnya, pembangunan pertanian tidak hanya diukur dari meningkatnya produksi, tetapi juga dari kemampuan petani untuk beradaptasi, memanfaatkan teknologi secara tepat, dan memperoleh peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pemkabgrobogan #groboganagroexpo #GAEVIII2026	https://www.instagram.com/p/DZHkRbyy4b6/
--	-------	-------	-----	--	---

	03/06	Sekda	Sosialisasi Pariwara Antikorupsi	Tata kelola yang baik tidak lahir begitu saja. Ia dibangun melalui komitmen untuk menjaga integritas, memperbaiki sistem, dan memastikan setiap pelayanan berjalan secara adil dan akuntabel. Karena itu, upaya pencegahan korupsi perlu dibangun sejak awal melalui budaya kerja yang mendorong kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Rabu (3/6/2026), Sekda Anang Armunanto menjadi narasumber pada Sosialisasi Pariwara Antikorupsi 2026, Antigratifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 yang diselenggarakan Inspektorat Daerah. Kegiatan ini diikuti perwakilan perangkat daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa Program Pariwara Antikorupsi merupakan bagian dari kampanye yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan melalui pendekatan yang lebih komunikatif dan kolaboratif. Selain itu, perangkat daerah juga didorong untuk menindaklanjuti hasil SPI 2025 sebagai bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola. Hasil survei tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ukuran penilaian, tetapi juga menjadi masukan untuk memperkuat sistem, menutup potensi kerawanan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sekda juga menyinggung pentingnya pemahaman mengenai gratifikasi, termasuk mekanisme pelaporan yang telah diatur dalam ketentuan terbaru. Pemahaman tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga profesionalitas ASN sekaligus menghindari potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Penguatan integritas pada akhirnya tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga bagian dari upaya bersama untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan dapat dipercaya. Ketika tata kelola berjalan lebih baik, manfaatnya akan kembali dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang semakin profesional dan akuntabel. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #antikorupsi #kpkri		https://www.instagram.com/p/DZH4W0CmA5x/?img_index=1
--	-------	-------	----------------------------------	---	--	---

	03/06	Sekda	Sosialisasi Pariwara Antikorupsi	Sekda Grobogan Dorong Penguatan Budaya Antikorupsi melalui Pariwara Antikorupsi 2026 PURWODADI – Tata kelola yang baik tidak lahir begitu saja. Ia dibangun melalui komitmen untuk menjaga integritas, memperbaiki sistem, dan memastikan setiap pelayanan berjalan secara adil serta akuntabel. Karena itu, upaya pencegahan korupsi perlu terus diperkuat melalui budaya kerja yang menjunjung kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Pariwara Antikorupsi 2026, Anti Gratifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 yang diselenggarakan Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan di Aula Inspektorat Daerah, Rabu (3/6/2026). Kegiatan yang diikuti 55 peserta dari perangkat daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya antikorupsi sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan. Dalam pemaparannya, Sekda menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan aturan, tetapi juga melalui pembentukan budaya kerja yang berintegritas di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, setiap aparatur memiliki tanggung jawab untuk menjaga profesionalisme, menghindari konflik kepentingan, serta menjalankan tugas secara objektif dan akuntabel. Upaya tersebut sejalan dengan pelaksanaan Pariwara Antikorupsi 2026, program kampanye antikorupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui kampanye bertajuk “Ide Besar Tak Harus Mahal”, perangkat daerah dan BUMD didorong menghadirkan berbagai bentuk edukasi dan kampanye kreatif yang menanamkan nilai-nilai kejujuran serta kepedulian terhadap pencegahan korupsi. Berbagai isu yang menjadi fokus kampanye antara lain pencegahan gratifikasi, suap, konflik kepentingan, nepotisme, penyalahgunaan fasilitas negara, kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, hingga penguatan mekanisme pelaporan pelanggaran. Selain penguatan budaya antikorupsi, sosialisasi juga membahas tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025. Sekda menilai hasil SPI perlu dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki sekaligus memperkuat sistem pengendalian di masing-masing perangkat daerah. Melalui tindak lanjut yang tepat, rekomendasi SPI diharapkan tidak berhenti pada angka penilaian semata, tetapi menjadi dasar perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada kesempatan yang sama, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai mekanisme pengendalian dan pelaporan gratifikasi, termasuk perubahan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026. Sekda mengingatkan bahwa gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan wajib ditolak. Apabila pemberian tidak dapat ditolak dalam kondisi tertentu, ASN maupun penyelenggara negara wajib melaporkannya sesuai mekanisme yang berlaku melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Menurutnya, pemahaman terhadap aturan tersebut penting agar aparatur mampu mengambil keputusan secara tepat sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Melalui penguatan budaya antikorupsi, tindak lanjut hasil SPI, serta peningkatan pemahaman mengenai pengendalian gratifikasi, pemerintah daerah berupaya memperkuat integritas birokrasi dan menutup berbagai celah yang berpotensi menimbulkan praktik koruptif. Pada akhirnya, langkah-langkah tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, tetapi juga untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih transparan, adil, dan akuntabel. (jsa)	https://setda.grobogan.go.id/index.php/profil/asisten-sekda/administrasi/bag-protokol-komunikasi-pimpinan/sekda-grobogan-dorong-penguatan-budaya-antikorupsi-melalui-pariwara-antikorupsi-2026
--	-------	-------	----------------------------------	--	---

	04/06	Sekda	Assesment JPTP	Kebutuhan organisasi yang terus bergerak menuntut pengisian jabatan dilakukan secara terbuka, objektif, dan berbasis kompetensi, agar kesinambungan pelayanan publik tetap terjaga. Rabu (3/6/2026), Seleksi Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 resmi dibuka oleh Bupati Grobogan Bapak Setyo Hadi di Surakarta. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekda Anang Armunanto selaku Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Uji Kompetensi melalui Metode Assessment Center. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa seleksi terbuka ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan organisasi, khususnya dalam mengisi jabatan yang kosong akibat pensiun, mutasi, maupun faktor lainnya yang berdampak pada kinerja pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Grobogan menegaskan komitmen menjaga tata kelola yang profesional sejalan dengan visi daerah "Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan". Seleksi ini dilaksanakan bekerja sama dengan P2KPK SDM LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai fasilitator assessment center, yang berlangsung pada 3–5 Juni 2026, serta telah memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bupati juga menekankan pentingnya integritas, objektivitas, dan profesionalitas dalam setiap tahapan seleksi, serta mengajak peserta mengikuti proses secara sungguh-sungguh untuk menghadirkan pejabat yang kompeten dan berintegritas. Tercatat 20 pelamar mengikuti seleksi terbuka ini, dengan 18 peserta menjalani uji kompetensi melalui metode assessment center. Dua pelamar masing-masing mendaftar pada lebih dari satu formasi jabatan, sementara dari lima formasi yang dibuka, terdapat satu formasi yang sempat diperpanjang masa pendaftarannya hingga memenuhi ketentuan. Pada akhirnya, proses seleksi ini bukan hanya tentang pengisian jabatan, tetapi juga memastikan hadirnya sosok yang tepat untuk menjaga ritme pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembagrobogan #asn #bkn	https://www.instagram.com/p/DZKL37JmDQf/?img_index=1
--	-------	-------	----------------	---	---

	04/06	Sekda	Workshop KUA PPAS	Kebutuhan masyarakat terus berkembang, sementara kemampuan anggaran daerah selalu memiliki batas. Karena itu, tantangan dalam perencanaan pembangunan bukan hanya bagaimana membelanjakan anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang tersedia benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Kamis (4/6/2026), Sekda Anang Armunanto membuka Workshop Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang diselenggarakan BPPKAD Kabupaten Grobogan. Kegiatan ini diikuti perangkat daerah dengan menghadirkan narasumber dari Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2027 harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah sekaligus memenuhi berbagai ketentuan yang telah diamanatkan pemerintah pusat, termasuk belanja wajib pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan desa. Menurutnya, keterbatasan fiskal justru menuntut pemerintah daerah semakin cermat dalam menentukan prioritas. Anggaran yang tersedia harus diarahkan pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan memberikan dampak yang terukur. Ia menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan menempatkan alokasi belanja secara tepat sasaran, efektif, dan mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah didorong menyusun perencanaan yang realistis, berbasis kebutuhan, serta selaras dengan arah pembangunan daerah maupun kebijakan nasional. Selain membahas penyalarsan kebijakan fiskal pusat dan daerah, workshop ini juga menjadi ruang penguatan kapasitas bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang lebih akurat, terukur, serta sesuai ketentuan yang berlaku. Perencanaan yang baik mungkin tidak selalu terlihat langsung oleh masyarakat. Namun dari proses itulah berbagai layanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih luas. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #apbd #perencanaanpembangunan	https://www.instagram.com/p/DZKePTKGBEh/?img_index=1
--	-------	-------	-------------------	--	---

	04/06	Sekda	Workshop KUA PPAS	Purwodadi – Pengelolaan anggaran daerah dituntut semakin adaptif di tengah keterbatasan fiskal dan kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang. Karena itu, setiap rupiah dalam APBD perlu dirancang agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, saat membuka Workshop Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang digelar BPPKAD di Purwodadi, Kamis (4/6/2026). Kegiatan ini diikuti perangkat daerah dengan menghadirkan narasumber dari Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan anggaran daerah, terlebih di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional dan perubahan regulasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyampaikan bahwa penyusunan APBD Tahun 2027 harus mengacu pada kerangka kebijakan makro dan fiskal nasional, serta memastikan keselarasan dengan arah pembangunan pusat dan daerah. “Perlu saya tegaskan, penyusunan KUA-PPAS wajib mempedomani Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal nasional. Kebijakan daerah harus sinergis dengan kebijakan pusat,” ujarnya. Sekda juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan dokumen perencanaan mengakomodasi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), termasuk kewajiban belanja mandatory spending seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta alokasi dana desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, ruang fiskal yang terbatas menuntut pemerintah daerah untuk semakin cermat dalam menentukan prioritas. “Efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, tetapi memastikan setiap alokasi benar-benar tepat sasaran, efektif, dan berdampak terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah,” jelasnya. Ia menambahkan, efisiensi juga dimaknai sebagai kemampuan menempatkan program pada prioritas yang tepat dalam keterbatasan anggaran, bukan sekadar melanjutkan pola penganggaran sebelumnya. Dalam kesempatan itu, Sekda juga menyinggung bahwa penyusunan anggaran daerah harus tetap memperhatikan sinkronisasi dengan proyek strategis nasional serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Lebih lanjut, ia memberikan sejumlah penekanan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar menjaga rasionalitas pendapatan dan memastikan struktur belanja disusun secara prudent serta sesuai ketentuan mandatory spending. Kepada perangkat daerah, Sekda meminta agar setiap usulan anggaran diselaraskan dengan target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 serta berorientasi pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Standar Harga Satuan Regional (SHSR) sebagai instrumen pengendalian biaya sejak tahap perencanaan. Sementara itu, bagi perangkat daerah yang mengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Sekda menekankan pentingnya integrasi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ke dalam dokumen APBD secara utuh dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan yang terukur dan berkelanjutan. Kepada para kasubag perencanaan di perangkat daerah, Sekda mengingatkan bahwa mereka memiliki peran penting dalam memastikan konsistensi teknis perencanaan, mulai dari kesesuaian sub kegiatan, output, hingga standar biaya dan sumber pendanaan. Hal tersebut disampaikan Sekda agar seluruh proses perencanaan dapat berjalan lebih sinkron, tidak tumpang tindih, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di akhir arahannya, Sekda juga menyinggung perbedaan dua pendekatan penting dalam pengelolaan anggaran, yakni cost efficiency dan cost effectiveness. Ia menjelaskan, cost efficiency berfokus pada upaya meminimalkan penggunaan biaya, waktu, dan sumber daya untuk menghasilkan output sesuai standar yang ditetapkan. Sementara cost effectiveness menitikberatkan pada sejauh mana anggaran yang digunakan mampu menghasilkan dampak atau kualitas hasil yang maksimal bagi tujuan pembangunan. Dengan demikian, efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai penghematan, tetapi juga ketepatan penggunaan anggaran, sedangkan efektivitas menekankan pada hasil dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.	https://setda.grobogan.go.id/index.php/profil/asisten-sekda/administrasi/bag-protokol-komunikasi-pimpinan/sekda-grobogan-kua-ppas-harus-efisien-tepat-sasaran-dan-selaras-kebijakan-fiskal-nasional
--	-------	-------	-------------------	--	---

	04/06	Sekda	BALAS KOMENTAR	Halo Ahmad Bisri, salam GenRe! Selamat atas pencapaianmu mewakili Kabupaten Grobogan di ajang Duta GenRe Jawa Tengah. Pemerintah Daerah tentu bangga atas kreativitas dan prestasi pemuda kita. Terkait permohonan dukungan tersebut, boleh diinfokan terlebih dahulu seperti apa bentuk dukungan yang diharapkan? Silakan disampaikan saja ya, nanti akan kami pelajari sesuai dengan kapasitas yang ada. Tetap semangat, persiapkan diri dengan maksimal, dan semoga sukses memberikan yang terbaik untuk Grobogan!		
	05/06	Sekda	Poster Hari Lingkungan Hidup Sedunia	Lingkungan yang baik tidak hanya ditentukan oleh kebijakan atau program besar. Ia juga tumbuh dari kebiasaan yang dilakukan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Dari cara kita mengelola sampah, menjaga kebersihan sungai dan saluran air, menghemat penggunaan energi, hingga merawat ruang hijau di sekitar lingkungan tempat tinggal. Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi pengingat bahwa perubahan iklim bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Dampaknya dapat dirasakan melalui cuaca yang semakin tidak menentu, berkurangnya kualitas lingkungan, hingga meningkatnya risiko bencana yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Karena itu, menjaga lingkungan tidak selalu harus dimulai dari langkah yang besar. Kepedulian yang dilakukan secara bersama-sama sering kali menjadi fondasi penting bagi terciptanya lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, "Saatnya Bekerja untuk Iklim", mengajak kita untuk tidak berhenti pada kesadaran, tetapi mulai mengambil peran sesuai kemampuan masing-masing. Sebab lingkungan yang kita jaga hari ini akan menjadi warisan yang dirasakan oleh generasi berikutnya. #HariLingkunganHidupSedunia #WorldEnvironmentDay #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembagrobogan		https://www.instagram.com/p/DZMKgGPGP46/?img_index=1
	05/06	Sekda	Poster Hari Lingkungan Hidup Sedunia			https://www.instagram.com/p/DZMKgGPGP46/?img_index=1

	05/06	Sekda	Ultah Wabup	Selamat ulang tahun kepada Wakil Bupati Grobogan, Bapak H. Sugeng Prasetyo. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kesehatan, umur yang berkah, kebahagiaan, serta kemudahan dalam setiap langkah pengabdian untuk masyarakat dan Kabupaten Grobogan. Semoga amanah yang diemban senantiasa diberikan kelancaran, kekuatan, dan keberkahan, sehingga dapat terus menghadirkan manfaat bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang semakin maju dan sejahtera. Barakallah fii umrik. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, perlindungan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #wakilbupatigrobogan #ulangtahun		https://www.instagram.com/p/DZMan-3yMA7/
	05/06	Sekda	Apresiasi Pemda	Kinerja pemerintah daerah pada akhirnya tidak hanya diukur dari program yang dijalankan, tetapi juga dari sejauh mana hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Mulai dari upaya menurunkan angka kemiskinan, mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, hingga mempercepat penanganan stunting, seluruhnya menjadi indikator yang semakin mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kamis (4/6/2026), Sekda Anang Armunanto mendampingi Bupati Grobogan Bapak Setyo Hadi menghadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Wilayah Jawa dan Bali yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bersama di Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penilaian dilakukan menggunakan data kuantitatif yang terbuka dan dapat diawasi, antara lain terkait kemiskinan, stunting, pengangguran, dan inflasi. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah pusat mendorong tumbuhnya iklim kompetisi yang sehat antardaerah sekaligus memacu peningkatan kualitas kinerja pemerintahan. Selain menjadi ajang apresiasi, forum ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan pembelajaran antardaerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Berbagai indikator yang dibahas menjadi pengingat bahwa upaya menurunkan kemiskinan, mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan mempercepat penanganan stunting membutuhkan kerja yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Melalui forum seperti ini, pemerintah daerah dapat memperkaya perspektif sekaligus memperoleh berbagai pembelajaran yang dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan kebijakan di daerah. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #kemendagri #pembangunandaerah #pelayananpublik		https://www.instagram.com/p/DZL_EfNmGh9/?img_index=1

	06/06	Sekda	HLHS 2026	Lingkungan yang bersih dan sehat tidak tercipta dengan sendirinya. Ia tumbuh dari kepedulian yang diwujudkan melalui tindakan nyata, mulai dari kebiasaan sehari-hari hingga gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Di tengah berbagai tantangan lingkungan dan perubahan iklim, menjaga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama yang tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Peran pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun komunitas saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Sabtu (6/6/2026), Sekda Anang Armunanto mendampingi Wakil Bupati Bapak H. Sugeng Prasetyo dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 di Taman Hijau Kota Purwodadi. Pada kesempatan tersebut, jajaran Pemkab Grobogan dan Forkopimda turut mengikuti kegiatan penanaman pohon, kerja bakti membersihkan area taman, serta video teleconference Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema "Act Now for Climate" atau "Saatnya Bekerja untuk Iklim". Tema tersebut mengajak seluruh pihak untuk menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai aksi nyata yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sambutan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, ditekankan pentingnya perubahan paradigma pengelolaan sampah melalui Gerakan Pemilahan Sampah dari Rumah Tangga untuk Indonesia ASRI. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya peduli lingkungan yang dimulai dari rumah dan lingkungan sekitar. Pada akhirnya, menjaga lingkungan bukan hanya tentang merawat ruang yang kita tempati hari ini, tetapi juga tentang menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Sebab, lingkungan yang lestari lahir dari kesadaran dan tindakan bersama yang dilakukan secara berkelanjutan. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pemkabgrobogan #HariLingkunganHidup #ActNowForClimate		https://www.instagram.com/p/DZPC1vaSs8g/
--	-------	-------	-----------	--	--	---

	08/06	Sekda	Pariwara Anti Korupsi Kucing	Tidak semua hal yang memengaruhi keputusan datang dalam bentuk yang besar. Kadang, ia hadir melalui sesuatu yang tampak sepele. Sebuah perhatian, pemberian, atau perlakuan yang dianggap biasa. Masalahnya bukan semata pada benda yang diberikan. Yang perlu diwaspadai adalah pengaruh yang mungkin muncul setelahnya. Ketika perhatian mulai berbeda, perlakuan khusus dapat muncul tanpa disadari. Padahal pelayanan publik dituntut untuk berjalan secara objektif, sesuai prosedur, dan berdasarkan standar pelayanan yang berlaku. Karena itu, menolak gratifikasi bukan hanya tentang menolak pemberian. Lebih dari itu, menolak gratifikasi merupakan upaya menjaga objektivitas, keadilan, dan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik. Pada akhirnya, pelayanan yang baik tidak ditentukan oleh hubungan maupun kedekatan, melainkan oleh komitmen untuk melayani secara profesional, setara, dan tanpa perlakuan khusus. #PariwaraAntiKorupsi #TolakGratifikasi #SetdaGrobogan #AntiGratifikasi #PemkabGrobogan		
	08/06	Sekda	Pariwara Anti Korupsi Kucing			
	08/06	Sekda	Pariwara Anti Korupsi Kucing			
	08/06	Sekda	Pariwara Anti Korupsi Kucing			

	08/06	Sekda	Audiensi PWRI	Pengabdian kepada bangsa dan negara tidak selalu berakhir saat seseorang memasuki masa purnatugas. Pengalaman, pengetahuan, serta nilai-nilai yang telah dibangun selama bertahun-tahun tetap menjadi modal berharga yang dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, menjaga silaturahmi dan ruang komunikasi dengan para purnawirawan menjadi bagian penting dalam merawat semangat kebersamaan serta memperkuat kontribusi mereka di tengah kehidupan bermasyarakat. Senin (8/6/2026), Sekda Anang Armunanto menerima audiensi Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Grobogan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Srikandi. Dalam pertemuan tersebut, Pengurus PWRI menyampaikan rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PWRI eks-Karesidenan Semarang yang akan digelar di Kabupaten Grobogan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi ruang untuk mempererat komunikasi dan berbagi pengalaman antaranggota PWRI dari berbagai daerah. Pengurus PWRI juga menyampaikan informasi terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional dan peringatan Hari Ulang Tahun PWRI yang akan diselenggarakan pada Juli 2026. Berbagai agenda organisasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan peran PWRI sebagai wadah bagi para purnawirawan untuk tetap aktif, produktif, dan berkontribusi di lingkungan masing-masing. Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Melalui komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat, termasuk para purnawirawan, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat dalam mendukung pembangunan daerah serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #PWRI #Grobogan		https://www.instagram.com/p/DZUs_hkmEqZ/?img_index=1
--	-------	-------	---------------	---	--	---

	08/06	Sekda	Koordinasi SSGI 2026	Setiap anak berhak tumbuh sehat, mendapatkan asupan gizi yang cukup, serta memperoleh layanan kesehatan yang memadai sejak dini. Karena itu, upaya menurunkan stunting tidak hanya menjadi urusan sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar setiap intervensi benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Senin (8/6/2026), Sekda Anang Armunanto memberikan arahan dalam kegiatan Koordinasi dan Sinergi Penanganan dan Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka persiapan pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2026 yang diselenggarakan Bapperida Kabupaten Grobogan di MPP Srikandi. Dalam arahannya, Sekda mengingatkan pentingnya evaluasi bersama terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan. Menurutnya, perbedaan data prevalensi stunting yang masih cukup signifikan perlu menjadi perhatian untuk memastikan setiap program dan bantuan yang diberikan tepat sasaran. "Saya percaya njenengan sudah melakukan segala hal yang bisa dilakukan. Kalau melihat data, harus ada yang kita evaluasi. Barangkali usaha kita masih ada yang kurang, melalui forum ini ayo kita evaluasi," ujarnya. Ia menekankan bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan kerja bersama lintas sektor, mulai dari pemantauan tumbuh kembang balita, penguatan layanan kesehatan, peningkatan akses pangan bergizi, perlindungan sosial bagi keluarga rentan, hingga pendampingan berkelanjutan di tingkat desa dan keluarga. Perhatian juga diberikan pada kualitas pengukuran dan pemantauan pertumbuhan balita. Sebab, data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan langkah intervensi yang tepat serta memastikan setiap anak yang membutuhkan pendampingan dapat terjangkau layanan yang tersedia. Melalui sinergi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, upaya percepatan penurunan stunting diharapkan semakin efektif. Pada akhirnya, target yang ingin dicapai bukan sekadar penurunan angka, melainkan memastikan semakin banyak anak di Kabupaten Grobogan tumbuh sehat dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #stunting #Grobogan		https://www.instagram.com/p/DZUJ9KzmD6j/?img_index=1
--	-------	-------	----------------------	---	--	---

	08/06	Sekda	Koordinasi SSGI 2026	Jelang SSGI 2026, Pemkab Grobogan Perkuat Sinergi Percepatan Penurunan Stunting Purwodadi – Upaya menurunkan stunting tidak hanya bergantung pada program yang dijalankan, tetapi juga pada kemampuan memastikan setiap intervensi benar-benar menjangkau sasaran yang membutuhkan. Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci agar penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, saat memberikan arahan dalam kegiatan Koordinasi dan Sinergi Penanganan dan Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2026 yang diselenggarakan Bapperida Kabupaten Grobogan di Ruang Amarta Mal Pelayanan Publik Srikandi, Senin (7/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti perangkat daerah, camat, kepala UPTD puskesmas, serta berbagai pihak yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Grobogan. Dalam arahannya, Sekda mengajak seluruh pihak untuk terus melakukan evaluasi terhadap berbagai upaya yang telah berjalan selama ini. Menurutnya, forum koordinasi menjadi ruang penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sekaligus memperkuat kolaborasi antarinstansi agar intervensi yang dilakukan semakin tepat sasaran. Ia menekankan bahwa setiap perangkat daerah memiliki peran yang saling melengkapi dalam upaya penurunan stunting, mulai dari pemantauan kesehatan ibu dan anak, penyediaan pangan bergizi, perlindungan sosial, hingga pendampingan keluarga dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Selain memastikan program berjalan sesuai tugas masing-masing, Sekda juga mengingatkan pentingnya memastikan berbagai bantuan dan intervensi benar-benar diterima oleh kelompok sasaran yang membutuhkan. Menurutnya, ketersediaan pangan bergizi, bantuan sosial, maupun dukungan program lainnya perlu dikawal agar sampai kepada keluarga berisiko stunting dan memberikan manfaat yang optimal. Dalam forum tersebut disampaikan bahwa target prevalensi stunting Kabupaten Grobogan pada tahun 2026 sebesar 17,65 persen dan ditargetkan turun menjadi 14,90 persen pada akhir periode RPJMD. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, pemerintah desa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut adalah pentingnya penguatan kualitas data dan pemantauan pertumbuhan balita. Evaluasi dilakukan untuk memastikan hasil pengukuran dan pelaporan dapat menjadi dasar yang akurat dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan intervensi di lapangan. Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa dari total 75.571 balita di Kabupaten Grobogan, sebanyak 71.566 balita atau sekitar 94,7 persen telah mengikuti penimbangan dan pengukuran pada Maret 2026. Capaian tersebut dinilai penting sebagai dasar pemantauan tumbuh kembang anak sekaligus upaya deteksi dini permasalahan gizi. Meski demikian, masih terdapat sebagian balita yang belum mengikuti penimbangan dan pengukuran secara rutin. Karena itu, seluruh pihak didorong untuk memperkuat pendampingan dan memastikan setiap balita dapat terpantau pertumbuhan serta perkembangan kesehatannya. Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas layanan Posyandu dan Puskesmas, penguatan kapasitas kader, serta pelaksanaan intervensi serentak sebagaimana arahan pemerintah pusat. Langkah tersebut mencakup pendataan ibu hamil dan balita, edukasi gizi, pemberian vitamin dan suplemen sesuai standar, hingga pencatatan dan pelaporan yang lebih tertib dan akurat. Dalam pembagian peran lintas sektor, Dinas Kesehatan bertanggung jawab mengoordinasikan intervensi spesifik bidang kesehatan. Dinas Pangan, Dinas Pertanian, serta Dinas Peternakan dan Perikanan mendukung ketersediaan pangan bergizi bagi keluarga sasaran. Sementara Dinas Sosial, DP3AKB, Dispermades, serta pemerintah kecamatan dan desa berperan memperkuat pendampingan keluarga, perlindungan sosial, dan pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dukungan juga datang dari berbagai pihak, termasuk BUMD, dan Baznas melalui program bantuan sosial maupun dukungan pemenuhan gizi bagi kelompok yang membutuhkan. Melalui penguatan koordinasi dan pembagian peran yang lebih terarah, Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan	https://setda.grobogan.go.id/index.php/profil/asisten-sekda/administrasi/bag-protokol-komunikasi-pimpinan/jelang-ssgi-2026-pemkab-grobogan-perkuat-sinergi-percepatan-penurunan-stunting
--	-------	-------	----------------------	--	---

	08/06	Sekda	Dukungan Sensus Ekonomi	Sensus Ekonomi 2026 menegaskan bahwa kualitas kebijakan sangat bergantung pada satu hal mendasar: data yang akurat, lengkap, dan objektif sebagai dasar pengambilan keputusan. Tanpa itu, arah pembangunan berisiko tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dalam konteks tersebut, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan pendataan, tetapi juga sebagai upaya memperkuat fondasi tata kelola ekonomi daerah. Data yang dihasilkan diharapkan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang struktur ekonomi, dinamika pelaku usaha, hingga potensi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Grobogan. Sekda Anang Armunanto menyampaikan dukungan penuh atas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh wilayah. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. "Di tingkat birokrasi pemerintahan, data yang akurat adalah kunci utama tata kelola yang efektif dan efisien," demikian disampaikan. Lebih lanjut, hasil sensus ini akan menjadi rujukan bagi perangkat daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, memperkuat rantai pasok, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekda juga mengimbau seluruh jajaran ASN, camat, kepala desa, dan lurah untuk mengawal pelaksanaan pendataan lapangan oleh petugas BPS. Partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha, baik mikro, kecil, menengah, maupun besar, menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini. Masyarakat diharapkan dapat menerima petugas sensus dengan terbuka serta memberikan data yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya, mengingat kerahasiaan data dijamin oleh undang-undang. Pada akhirnya, Sensus Ekonomi bukan sekadar angka, melainkan potret yang akan menentukan arah kebijakan ke depan. Ketepatan data menjadi fondasi penting bagi ketepatan langkah. "Data jujur, Grobogan makmur." #SensusEkonomi2026 #Grobogan #PemkabGrobogan #SekdaGrobogan #BPS	https://www.instagram.com/p/DZU79nHyYZz/
--	-------	-------	-------------------------	--	---

	09/06	Sekda	Pariwara Anti Korupsi	Tidak semua hal yang memengaruhi keputusan datang dalam bentuk yang besar. Kadang, ia hadir melalui sesuatu yang tampak sepele. Sebuah perhatian, pemberian, atau perlakuan yang dianggap biasa. Masalahnya bukan semata pada benda yang diberikan. Yang perlu diwaspadai adalah pengaruh yang mungkin muncul setelahnya. Ketika perhatian mulai berbeda, perlakuan khusus dapat muncul tanpa disadari. Padahal pelayanan publik dituntut untuk berjalan secara objektif, sesuai prosedur, dan berdasarkan standar pelayanan yang berlaku. Karena itu, menolak gratifikasi bukan hanya tentang menolak pemberian. Lebih dari itu, menolak gratifikasi merupakan upaya menjaga objektivitas, keadilan, dan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik. Pada akhirnya, pelayanan yang baik tidak ditentukan oleh hubungan maupun kedekatan, melainkan oleh komitmen untuk melayani secara profesional, setara, dan tanpa perlakuan khusus. #PariwaraAntiKorupsi #AntikorupsiGrobogan #SetdaGrobogan #AntiGratifikasi #PemkabGrobogan		https://www.instagram.com/p/DZbSoJ4mMBm/?img_index=1
	09/06	Sekda	Pariwara Anti Korupsi			
	09/06	Sekda	Pariwara Anti Korupsi			

	09/06	Sekda	Uji Gagasan JPT	Pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh program yang direncanakan, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan yang mampu menerjemahkan visi menjadi langkah nyata. Karena itu, proses pengisian jabatan pimpinan di lingkungan pemerintahan perlu dilakukan secara terbuka, objektif, dan berbasis kompetensi agar mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas serta gagasan yang relevan dengan kebutuhan daerah. Selasa (9/6/2026), Sekda Anang Armunanto selaku Ketua Panitia Seleksi memberikan arahan kepada peserta Seleksi Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2026. Arahan disampaikan secara daring dari ruang kerja Sekda menjelang pelaksanaan penyusunan Uji Gagasan atau Makalah oleh para peserta seleksi. Pada tahapan ini, peserta diminta menyusun uji gagasan dengan tema kebijakan daerah dan strategi yang akan dilakukan sesuai jabatan yang dilamar dalam mewujudkan visi-misi Kabupaten Grobogan, Program Asta Cita, serta Proyek Strategi Nasional. Melalui karya tulis tersebut, peserta diharapkan mampu menunjukkan pemahaman terhadap tantangan yang dihadapi, strategi yang akan ditempuh, inovasi yang dapat dikembangkan, serta solusi atas berbagai permasalahan di bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Selain menjadi bagian dari proses seleksi, penyusunan uji gagasan juga menjadi ruang bagi peserta untuk menuangkan pemikiran dan arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, proses seleksi tidak hanya mengukur kompetensi manajerial dan teknis, tetapi juga kemampuan peserta dalam merumuskan langkah yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis. Melalui seleksi yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, Pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya menghadirkan pimpinan perangkat daerah yang profesional, berintegritas, serta memiliki kapasitas untuk mendorong tercapainya program pembangunan yang semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #ASNBerAKHLAK #Grobogan	https://www.instagram.com/p/DZWqsU9GA0L/?img_index=1
--	-------	-------	-----------------	--	---

	09/06	Sekda	Gowes dan Kurve	Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten sering kali membentuk budaya kerja yang lebih kuat daripada instruksi formal. Dari hal-hal sederhana, tumbuh nilai disiplin, kepedulian, dan kebersamaan dalam lingkungan kerja. Selasa (9/6/2026), Sekda Anang Armunanto berangkat menuju kantor dengan bersepeda seperti rutinitas hari-hari sebelumnya. Kebiasaan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan sekaligus mendorong pola hidup yang lebih sederhana dan ramah lingkungan. Setibanya di kantor, ia bergabung bersama ASN di lingkungan Sekretariat Daerah dalam kegiatan Selasa Korve yang telah menjadi rutinitas setiap hari Selasa. Kegiatan ini merupakan kerja bakti dan gotong royong membersihkan lingkungan kantor sebagai bagian dari pembiasaan budaya kerja bersih dan tertata. Lebih dari sekadar menjaga kebersihan lingkungan kerja, kegiatan ini juga menjadi ruang konsolidasi informal yang memperkuat kebersamaan antar-ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Konsistensi kegiatan sederhana seperti ini diharapkan terus memperkuat budaya kerja yang tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga sehat secara lingkungan, solid secara sosial, dan berorientasi pada pelayanan. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #ASNBerAKHLAK #gotongroyong		https://www.instagram.com/p/DZW7c-ZyTL5/
--	-------	-------	-----------------	---	--	---

	09/06	Sekda	Sensus Ekonomi 2026	Kebijakan yang tepat sasaran selalu berawal dari data yang akurat. Tanpa data yang lengkap, objektif, dan mutakhir, berbagai program pembangunan berisiko tidak sepenuhnya menjawab kondisi yang terjadi di masyarakat. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti penting, tidak hanya sebagai kegiatan pendataan, tetapi juga sebagai upaya menyediakan fondasi informasi bagi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Selasa (9/6/2026), Sekda Anang Armunanto memberikan arahan sekaligus membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Purwodadi. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya peran petugas sensus dalam menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali menjadi momentum untuk memperbarui informasi mengenai aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi rujukan dalam memetakan potensi ekonomi daerah, menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, memperkuat pemberdayaan usaha, hingga mendukung penciptaan lapangan kerja. Sekda menegaskan bahwa data yang akurat, objektif, dan mutakhir merupakan fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang efektif serta penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Ia juga mengingatkan bahwa tugas petugas sensus tidak sekadar mengumpulkan data, tetapi juga membangun komunikasi yang baik dengan responden agar informasi yang diperoleh mencerminkan kondisi di lapangan. Pemerintah Kabupaten Grobogan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui keterlibatan perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, Kepala BPS Grobogan Aidzin menyampaikan bahwa sebanyak 1.648 petugas akan diterjunkan untuk melaksanakan pendataan dari 15 Juni hingga 30 Agustus 2026. Hasil dari Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menjadi dasar penting dalam memahami dinamika ekonomi daerah, sehingga kebijakan yang disusun ke depan semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #SensusEkonomi2026 #BPS		https://www.instagram.com/p/DZXIECnGFmF/?img_index=1
--	-------	-------	---------------------	---	--	---

				Sekda Grobogan Tekankan Akurasi Data sebagai Fondasi Sensus Ekonomi 2026 Purwodadi – Kualitas kebijakan pembangunan sangat ditentukan oleh ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, arah perencanaan berisiko tidak tepat sasaran di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, saat memberikan arahan sekaligus membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Purwodadi, Selasa (9/6/2026). Kegiatan ini diikuti ratusan petugas lapangan yang akan diterjunkan dalam pelaksanaan sensus di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan. Sekda menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis karena menjadi salah satu sumber utama pembaruan data ekonomi nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Menurutnya, data hasil sensus sebelumnya pada tahun 2016 sudah tidak lagi sepenuhnya merepresentasikan kondisi terkini akibat perubahan dan dinamika aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menekankan bahwa data yang valid menjadi dasar penting dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. “Sebagus apa pun perencanaan, akan sangat bergantung pada data yang akurat, objektif, dan mutakhir. Sebaliknya, tanpa itu, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran,” ujarnya. Lebih lanjut, Sekda menilai Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya berfungsi sebagai pendataan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memetakan potensi ekonomi daerah, mulai dari sektor unggulan, sentra usaha, hingga perkembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Data tersebut, kata dia, akan sangat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam program pemberdayaan usaha, perluasan kesempatan kerja, hingga upaya pengentasan kemiskinan. Sensus ini juga dinilai penting dalam memperkuat daya saing daerah, termasuk dalam menciptakan iklim investasi yang lebih terarah dan berbasis data. Dalam kesempatan itu, Sekda juga menyoroti tantangan di lapangan yang kerap dihadapi petugas sensus, terutama terkait persepsi masyarakat terhadap kegiatan pendataan. Menurutnya, sebagian responden masih memiliki anggapan berbeda ketika didatangi petugas, sehingga berpotensi memengaruhi keakuratan jawaban yang diberikan. Ia mencontohkan, ada yang menganggap pendataan berkaitan dengan bantuan, pajak, maupun akses pembiayaan, sehingga respon yang diberikan tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya. “Di sinilah pentingnya kemampuan petugas untuk membangun komunikasi yang baik agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” tegasnya. Sekda juga meminta para petugas mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sebagai bekal utama sebelum terjun ke lapangan. Ia menekankan bahwa kualitas data sangat bergantung pada ketelitian dan integritas petugas dalam menggali informasi dari responden. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Grobogan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Hal ini juga telah diperkuat melalui surat edaran Bupati Grobogan yang mengajak seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk berperan aktif sesuai tugas dan kewenangannya. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Grobogan, Aidzin, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan pelaksanaan sensus ekonomi kelima yang dilakukan secara nasional oleh Badan Pusat Statistik. Kegiatan ini mencakup seluruh sektor ekonomi di 38 provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa sensus akan memotret berbagai karakteristik usaha, mulai dari skala usaha, jumlah tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, hingga aspek legalitas dan lingkungan usaha. Selain itu, data juga mencakup kondisi usaha, pendapatan, pengeluaran, serta aset pada periode tertentu. Sensus Ekonomi 2026 juga akan menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial ekonomi keluarga yang menjadi bagian dari pembaruan data nasional. Dengan jumlah sekitar 1.648 petugas, pelaksanaan sensus akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 30 Agustus 2026 dengan metode pendataan langsung ke rumah tangga dan pelaku usaha di seluruh wilayah. Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap data yang dihasilkan		
09/06	Sekda	Sensus Ekonomi 2026			https://setda.grobogan.go.id/index.php/profil/asisten-sekda/administrasi/bag-protokol-komunikasi-pimpinan/sekda-grobogan-tekanan-akurasi-data-sebagai-fondasi-sensus-ekonomi-2026	

	09/06	Sekda	Audiensi Samsat	Kemudahan akses layanan perpajakan kendaraan bermotor menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan daerah yang kembali dirasakan manfaatnya oleh warga. Penguatan layanan tersebut terus didorong melalui berbagai langkah kolaboratif, termasuk optimalisasi layanan Samsat yang menjangkau hingga tingkat desa. Selasa (9/6/2026), Sekda Anang Armunanto menerima kunjungan Kepala UPPD Samsat Grobogan, Aris Wibowo, di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut membahas penguatan layanan perpajakan kendaraan bermotor, peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, serta upaya memperluas akses layanan yang lebih mudah dijangkau. Dalam kesempatan tersebut, turut dilakukan evaluasi pelaksanaan Gebyar Hadiah Samsat 2026 sebagai salah satu upaya meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam periode yang telah ditentukan. Selain itu, dibahas penguatan Samsat Budiman sebagai strategi mendekatkan layanan hingga tingkat desa. Melalui kolaborasi dengan 22 BUMDes di Kabupaten Grobogan, layanan diharapkan semakin mudah diakses masyarakat, lebih cepat, dan lebih transparan dalam pelaksanaannya. Upaya ini juga menjadi bagian dari penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Grobogan. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #samsat #grobogan		https://www.instagram.com/p/DZYpgBDmLTZ/?img_index=1
--	-------	-------	-----------------	--	--	---

	10/06	Sekda	Pinjaman Daerah	Pembangunan infrastruktur sering kali berhadapan dengan tantangan yang sama: kebutuhan di lapangan terus berkembang, sementara kemampuan pembiayaan daerah perlu dikelola secara cermat. Karena itu, setiap langkah percepatan pembangunan harus disiapkan dengan perencanaan yang matang agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Rabu (10/6/2026), Sekda Anang Armunanto memimpin rapat tindak lanjut rencana pinjaman daerah untuk pembiayaan akselerasi penanganan infrastruktur jalan dan pengendalian banjir dalam rangka penataan Kota Purwodadi. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati tersebut dihadiri perangkat daerah terkait bersama Bank Jateng. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses sinkronisasi kesiapan program dan pembahasan berbagai ketentuan yang diperlukan agar tahapan yang telah berjalan dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku. Sebelumnya, Bank Jateng juga telah melakukan survei sebagai bagian dari proses tersebut. Dalam arahnya, Sekda menegaskan bahwa tahapan yang telah dilaksanakan perlu terus dikawal agar berjalan sesuai prosedur. Ia juga meminta perangkat daerah terkait mencermati kembali lokasi-lokasi yang telah direncanakan dan memastikan kesesuaiannya dengan hasil pembahasan serta kesepakatan yang telah ditetapkan. Selain kesiapan teknis, pembahasan juga mempertimbangkan kondisi fiskal daerah yang dinamis. Karena itu, perencanaan yang telah disusun perlu terus dicermati agar tetap realistis, terukur, dan sejalan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengurangi tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Rencana pembiayaan tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan infrastruktur jalan pada sejumlah ruas prioritas serta pengendalian banjir di beberapa titik yang menjadi perhatian. Melalui perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik, upaya ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas, meningkatkan kenyamanan lingkungan, serta mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #pembangunan #grobogan	https://www.instagram.com/p/DZZYhzzmK2m/?img_index=1
--	-------	-------	-----------------	--	---

	11/06	Sekda	Dukungan Genre	Generasi muda bukan hanya penerus pembangunan, tetapi juga memiliki peran penting dalam membawa perubahan di lingkungan sekitarnya. Melalui ide, kepedulian, dan keteladanan, mereka dapat menjadi penggerak berbagai hal positif bagi sesama remaja. Saat ini, Kabupaten Grobogan diwakili oleh Ahmad Bisri Samaliki dan Ymoretha Kirana M. W. dalam ajang Duta Generasi Berencana (GenRe) Jawa Tengah. Duta GenRe merupakan figur teladan yang berperan sebagai pendidik sebaya, motivator, sekaligus agen perubahan dalam mengajak remaja merencanakan masa depan yang sehat, produktif, dan bertanggung jawab. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga membawa semangat dan harapan generasi muda Grobogan untuk terus tumbuh, berkarya, dan memberi dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Mari berikan dukungan terbaik untuk Ahmad Bisri Samaliki dan Ymoretha Kirana M. W. Setiap dukungan yang diberikan menjadi bentuk apresiasi atas semangat mereka dalam menyuarakan isu-isu penting bagi remaja sekaligus membawa nama Kabupaten Grobogan di tingkat yang lebih luas. Scan QR Code pada slide berikutnya dan berikan vote terbaik Anda. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #DutaGenRe #Grobogan		https://www.instagram.com/p/DZeQpafmLXp/?img_index=1
	11/06	Sekda	Dukungan Genre			https://www.instagram.com/p/DZeQpafmLXp/?img_index=1
	11/06	Sekda	Dukungan Genre			https://www.instagram.com/p/DZeQpafmLXp/?img_index=1
	11/06	Sekda	Dukungan Genre			https://www.instagram.com/p/DZeQpafmLXp/?img_index=1

11/06	Sekda	P4GN	Masa depan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kemampuan menjaga generasi mudanya agar tumbuh sehat, produktif, dan terhindar dari berbagai risiko yang dapat merusak masa depan mereka. Karena itu, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Peran pemerintah, sekolah, keluarga, aparat penegak hukum, hingga masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dan remaja. Rabu (10/6/2026), Sekda Anang Armunanto menghadiri Rapat Koordinasi Akselerasi Implementasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) di Pendapa Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan tersebut, Sekda membacakan sambutan Bupati Grobogan Bapak Setyo Hadi di hadapan para pemangku kepentingan dari enam daerah di wilayah Kedungsepur dan sekitarnya. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa posisi Grobogan sebagai jalur penghubung antarwilayah membawa banyak peluang pembangunan, namun juga memerlukan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan sosial, termasuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Rakor yang mengusung tema GAS POL ANANDA BERSINAR (Gerakan Aksi Sinergi P4GN Optimal Lintas Sektor Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak) menempatkan anak dan generasi muda sebagai fokus utama perlindungan. Sebab, penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga dapat memengaruhi pendidikan, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kabupaten Grobogan juga mendapat kepercayaan menjadi daerah pertama di Jawa Tengah sekaligus di Indonesia yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan rakor akselerasi implementasi P4GN ini. Momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi lintas daerah dalam membangun langkah pencegahan yang lebih terarah. Melalui kolaborasi yang kuat dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, upaya pencegahan dapat dilakukan lebih dini sehingga anak dan generasi muda memiliki ruang yang aman untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-citanya. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #P4GN #grobogan	https://www.instagram.com/p/DZb_YCumDQ7/?img_index=1
-------	-------	------	--	---

	11/06	Sekda	WTP	Grobogan Pertahankan Opini WTP Ke-11 Berturut-turut SEMARANG – Setiap program pembangunan dan pelayanan publik membutuhkan dukungan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kualitas tata kelola keuangan menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Komitmen tersebut kembali mendapat pengakuan melalui capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Dengan hasil tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan berhasil mempertahankan opini WTP untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Opini tersebut diserahkan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (11/6/2026). Bupati Grobogan, Setyo Hadi, hadir menerima LHP. Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah. Bupati menyampaikan bahwa capaian tersebut patut disyukuri sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang. “Ini adalah capaian yang membanggakan dan harus kita syukuri bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Semoga tahun depan bisa dipertahankan dan terus meningkat kualitasnya,” ujarnya. Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan. Capaian tersebut lahir dari proses pembenahan yang dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban anggaran, serta dukungan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi masing-masing. Upaya tersebut penting karena setiap program pembangunan dan pelayanan publik pada akhirnya bergantung pada pengelolaan keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Semakin baik tata kelola yang dibangun, semakin besar pula peluang program dan anggaran dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Meski demikian, opini WTP tidak dimaknai sebagai akhir dari proses perbaikan. Pemerintah Kabupaten Grobogan menilai capaian tersebut perlu menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat pengendalian internal, serta memastikan setiap anggaran yang dikelola dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebab pada akhirnya, kualitas tata kelola keuangan tidak hanya tercermin dari hasil pemeriksaan yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan setiap anggaran yang dikelola dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara lebih efektif. Melalui pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel, pemerintah daerah berharap manfaat berbagai program dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas. (jsa)	https://setda.grobogan.go.id/index.php/profil/asisten-sekda/administrasi/bag-protokol-komunikasi-pimpinan/grobogan-pertahankan-opini-wtp-ke-11-berturut-turut
--	-------	-------	-----	---	--

	11/06	Sekda	WTP	Setiap program pembangunan dan pelayanan publik membutuhkan dukungan pengelolaan keuangan yang tertib, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kualitas tata kelola keuangan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kamis (11/6/2026), Sekda Anang Armunanto mendampingi Bupati Grobogan Bapak Setyo Hadi dan Ketua DPRD Grobogan Ibu Lusia Indah Artani menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut diraih Kabupaten Grobogan. Raihan tersebut mencerminkan upaya yang dilakukan secara berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Di saat yang sama, capaian ini juga menjadi dorongan untuk terus menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada tahun-tahun mendatang. Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut turut menunjukkan sinergi yang terbangun antara jajaran eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah. Transparansi, kepatuhan terhadap ketentuan, serta komitmen untuk terus melakukan perbaikan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Opini WTP bukan sekadar predikat administratif. Di baliknya terdapat proses panjang berupa penguatan sistem, peningkatan akuntabilitas, serta kerja bersama seluruh perangkat daerah untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara tertib dan sesuai aturan. Capaian ini menjadi modal untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif serta memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Grobogan. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #WTP #grobogan		https://www.instagram.com/p/DZcjdkzGKcl/?img_index=1
--	-------	-------	-----	---	--	---

	12/06	Sekda	sINAR mAS X uns	Ketahanan pangan keluarga menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan pangan bergizi yang mudah dijangkau sehari-hari tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Jumat (12/6/2026), Sekda Anang Armunanto didampingi Dinas Pangan menerima audiensi PT Sinar Mas bersama pendamping akademisi dari Program Pascasarjana Penyuluhan Pembangunan dan Ilmu Gizi Universitas Sebelas Maret (UNS) di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut membahas pemanfaatan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus upaya penurunan stunting di Kabupaten Grobogan. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), PT Sinar Mas yang bergerak di bidang perkebunan telah melaksanakan program pemanfaatan pekarangan di Kecamatan Tawangharjo melalui penyediaan bibit tanaman produktif seperti cabai, terong, pepaya, jeruk, dan komoditas lainnya yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan apresiasi atas keterlibatan dunia usaha dan akademisi dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, persoalan stunting dan ketahanan pangan memerlukan kerja bersama agar penanganannya berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Ia juga mendorong agar pelaksanaan program terus dikoordinasikan dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait sehingga berbagai intervensi yang dilakukan dapat saling melengkapi dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sekda menilai pendampingan akademis penting untuk membantu mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi tingginya prevalensi stunting sehingga langkah yang diambil dapat semakin tepat sasaran. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menjawab tantangan pembangunan. Dengan dukungan data, pendampingan, dan keterlibatan berbagai pihak, upaya penguatan ketahanan pangan keluarga diharapkan semakin membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan bergizi sekaligus mendukung tumbuh kembang anak. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #ketahananpangan #stunting		https://www.instagram.com/p/DZefOMImDMU/?img_index=1
--	-------	-------	-----------------	--	--	---

	12/06	Sekda	pwri dan PMII	Pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh program pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan berbagai elemen masyarakat yang terus berkontribusi sesuai peran dan pengalamannya. Karena itu, ruang kolaborasi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kepemudaan perlu terus dijaga dan diperkuat. Jumat (12/6/2026), Sekda Anang Armunanto menerima kunjungan Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Grobogan dan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Grobogan di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Pengurus PWRI menyampaikan sejumlah agenda organisasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, termasuk Musyawarah Nasional (Munas) PWRI serta Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PWRI eks-Karesidenan Semarang yang direncanakan digelar di Kabupaten Grobogan. Sementara itu, PC PMII Kabupaten Grobogan menyampaikan persiapan pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) XVIII yang mengusung tema “Rekonstruksi Kaderisasi Menuju Era Baru PMII.” Pertemuan tersebut juga menjadi momentum penyerahan dukungan dari Bank Jateng untuk membantu pelaksanaan kegiatan kedua organisasi. Dukungan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran agenda organisasi sekaligus memperkuat kontribusi masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Sekda menyampaikan apresiasi atas peran yang selama ini diberikan oleh PWRI maupun PMII. Menurutnya, pengalaman dan pengabdian para senior serta semangat dan gagasan generasi muda merupakan modal sosial yang penting dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui komunikasi dan kolaborasi yang terus terjalin, berbagai elemen masyarakat diharapkan dapat saling menguatkan dan berkontribusi sesuai kapasitasnya masing-masing. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tumbuh dari partisipasi dan kepedulian bersama untuk kemajuan Kabupaten Grobogan. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pemkabgrobogan #PWRI #PMII		
--	-------	-------	---------------	--	--	--

	12/06	Sekda	BUMD	Pelayanan air bersih, akses pembiayaan bagi pelaku usaha, hingga optimalisasi aset daerah merupakan bagian dari upaya yang terus dilakukan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap rencana investasi daerah perlu melalui kajian yang matang agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Jumat (12/6/2026), Sekda Anang Armunanto menyimak paparan Laporan Pendahuluan Kajian Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Daerah (PMD) di ruang rapat Sekda. Kegiatan ini dihadiri Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Bapperida, BPPKAD, Bagian Perekonomian dan SDA Setda, jajaran BUMD, serta tim konsultan PT Sukses Bina Sejati. Kajian tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan rencana penyertaan modal daerah kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni Perumdam Purwa Tirta Dharma, PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda), dan Perumda Purwa Aksara. Dalam paparan tersebut, tim konsultan menyampaikan hasil kajian terhadap sejumlah opsi pengembangan pada masing-masing BUMD sesuai bidang usaha yang dijalankan. Kajian tersebut antara lain mencakup penguatan layanan air minum pada Perumdam Purwa Tirta Dharma, pengembangan pembiayaan produktif bagi pelaku usaha mikro dan kecil pada PT BPR Bank Purwa Artha, serta transformasi usaha pada Perumda Purwa Aksara agar lebih adaptif terhadap perkembangan kebutuhan dan peluang yang ada. Pembahasan juga mencakup berbagai aspek, mulai dari kebutuhan investasi, potensi pengembangan usaha, manfaat pelayanan publik, hingga kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Seluruhnya menjadi bagian dari proses kajian sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ke depan. Melalui perencanaan dan kajian yang matang, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap investasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang optimal. Selain mendukung peningkatan kualitas layanan dan penguatan usaha daerah, langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat peran BUMD dalam mendukung pembangunan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #BUMD #PMD #grobogan		
--	-------	-------	------	--	--	--

12/06	Sekda	Tenis	Di tengah rutinitas dan kesibukan pekerjaan, menyediakan waktu untuk berolahraga sering kali menjadi tantangan tersendiri. Padahal, bergerak sejenak dan menjaga kebugaran tetap penting di sela aktivitas sehari-hari. Setelah lebih dari dua tahun tidak bermain tenis, Jumat (12/6/2026), Sekda Anang Armunanto kembali mencoba memegang raket dan bermain bersama pegawai di Lapangan Tenis Kompleks Kantor Bupati Grobogan. Awalnya hanya menyaksikan latihan dari pinggir lapangan. Namun melihat semangat para pegawai yang sedang berlatih, keinginan untuk kembali turun ke lapangan pun sulit diabaikan. Tidak ada target khusus ataupun pertandingan yang serius. Hanya menikmati permainan, berkeringat bersama, dan kembali merasakan keseruan olahraga yang sudah cukup lama tidak dimainkan. Kadang, di tengah kesibukan yang padat, meluangkan waktu untuk bergerak dan berolahraga menjadi cara sederhana untuk menjaga kebugaran. Sesibuk apa pun aktivitas sehari-hari, kesehatan tetap perlu mendapat ruang untuk dijaga. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #tenis #hidupsehat		
12/06	Sekda	JPT	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 terus berproses melalui seleksi terbuka yang menekankan aspek kompetensi dan objektivitas dalam setiap tahapannya. Jumat (12/6/2026), Sekda Anang Armunanto selaku Ketua Panitia Seleksi bersama tim melaksanakan rapat koordinasi penetapan hasil uji kompetensi melalui metode assessment center. Rapat juga membahas persiapan tahapan lanjutan berupa uji gagasan makalah dan wawancara. Tahapan seleksi ini menjadi bagian dari rangkaian yang saling terhubung, dengan tujuan menjaga kualitas proses sesuai sistem merit serta kebutuhan organisasi. Pada tahap berikutnya, peserta akan mengikuti uji gagasan makalah dan wawancara untuk melihat lebih jauh kemampuan berpikir strategis, kualitas gagasan, serta kesiapan dalam menjalankan tugas jabatan. Melalui proses ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya menghadirkan pejabat yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memiliki kompetensi yang tepat untuk memperkuat kinerja pelayanan publik di daerah. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #JPTPratama #ASNBerAKHLAK		

	15/06	Sekda	hps	Sering kali perhatian publik tertuju pada hasil akhir pembangunan atau layanan yang diterima masyarakat. Padahal, kualitas hasil tersebut juga ditentukan oleh proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan sejak awal. Salah satu tahapan penting dalam proses itu adalah penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga penyusunannya harus didukung data yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menjadi penekanan Sekda Anang Armunanto, saat membuka Bimbingan Teknis Penyusunan HPS Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026, Senin (15/6/2026). Dalam arahnya, Sekda menegaskan agar penyusunan HPS tidak dilakukan sekadar sebagai formalitas administrasi atau hanya menyalin data yang sudah ada. Setiap perhitungan harus didukung survei pasar yang memadai, referensi harga yang relevan, serta dokumentasi yang lengkap. Penegasan ini menjadi penting mengingat masih ditemukannya kelemahan dalam penyusunan HPS yang berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran dan risiko dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui kegiatan yang diselenggarakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Grobogan ini, para pejabat teknis pengadaan diharapkan semakin memahami pentingnya penyusunan HPS yang cermat dan sesuai ketentuan. Sebab, tata kelola pengadaan yang baik bukan hanya soal terlaksananya proses, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran publik digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembagrobogan #asnBerAKHLAK #GoodGovernance		
--	-------	-------	-----	---	--	--

	15/06	Sekda	Paripurna	Setiap program pembangunan, pelayanan publik, dan penggunaan anggaran daerah pada akhirnya perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan begitu, berbagai kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dapat dievaluasi serta menjadi bahan perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya. Senin (15/6/2026), Sekda Anang Armunanto menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Grobogan dengan agenda Pembicaraan Tingkat I Tahap Kesatu Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 sekaligus penyampaian Nota Keuangan di Gedung Paripurna I DPRD Kabupaten Grobogan. Dalam penjelasannya, Bupati Grobogan Bapak Setyo Hadi menyampaikan gambaran pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada DPRD sesuai ketentuan yang berlaku. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diserahkan BPK RI, Kabupaten Grobogan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut merupakan opini WTP ke-11 yang diraih secara berturut-turut. Pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi bagian dari mekanisme pemerintahan, tetapi juga merupakan upaya memastikan setiap anggaran yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan terus ditingkatkan kualitas pengelolaannya. Melalui proses tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD dapat mengevaluasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran sebagai bahan perbaikan agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin baik dari waktu ke waktu. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkbgrobogan #APBD #grobogan		
--	-------	-------	-----------	---	--	--

15/06	Sekda	PINJAMAN DAERAH	Kondisi infrastruktur yang memadai menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta pelayanan publik. Karena itu, setiap rencana pembangunan perlu disiapkan secara cermat agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat yang optimal. Sekda Anang Armunanto menghadiri rapat koordinasi review dan optimalisasi rencana penanganan jalan kabupaten melalui skema pinjaman daerah yang dipimpin Bupati Grobogan Bapak Setyo Hadi bersama Wakil Bupati Bapak H. Sugeng Prasetyo di Ruang Rapat Wakil Bupati, Senin (15/6/2026). Rapat tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekda, Bapperida, BPPKAD, DPUPR, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pembangunan, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut pembahasan rencana pembiayaan untuk akselerasi penanganan infrastruktur jalan dan pengendalian banjir dalam rangka penataan kawasan Kota Purwodadi. Pada kesempatan tersebut, Sekda Anang Armunanto membuka rapat dan memandu jalannya diskusi bersama perangkat daerah terkait untuk mencermati kesiapan program serta berbagai aspek yang perlu dipenuhi agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan. Dalam arahnya, Bupati Bapak Setyo Hadi menekankan pentingnya menjaga tata kelola keuangan yang baik dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Berbagai aspek dicermati bersama, mulai dari kesiapan program, aspek regulasi, hingga kemampuan keuangan daerah, agar langkah yang ditempuh dapat dilaksanakan secara terukur dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pembahasan juga difokuskan pada sinkronisasi kesiapan program dan pemenuhan berbagai persyaratan yang diperlukan sebelum tahapan berikutnya dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Melalui perencanaan yang matang dan kehati-hatian dalam setiap prosesnya, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang ditempuh tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, memenuhi ketentuan yang berlaku, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #infrastruktur #grobogan		
15/06	Sekda	Hijriah	Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Momentum pergantian tahun dalam kalender Hijriah menjadi kesempatan untuk menata kembali langkah, memperbaiki diri, dan memperkuat niat dalam menjalankan setiap amanah. Semoga tahun yang baru membawa keberkahan, kesehatan, serta kemudahan dalam setiap ikhtiar. Semoga pula semangat hijrah menginspirasi kita untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih peduli terhadap sesama. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #TahunBaruIslam #1Muharram1448H		https://www.instagram.com/p/DZogUM5y69/

	16/06	Sekda	Aduan	Baik, akan kami upayakan fasilitasi koordinasi wawancara dengan Bupati. Mohon diinformasikan deadline atau batas waktunya agar bisa disesuaikan dengan agenda beliau.		
	16/06	Sekda	Aduan	Terima kasih atas perhatiannya. Dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi, petugas melakukan pendataan secara luas sehingga tidak semata-mata terkait pemberian bantuan.		
	16/06	Sekda	Aduan	Terima kasih atas pertanyaannya. Saat ini kami belum memiliki informasi lowongan pekerjaan yang dapat disampaikan. Kami sarankan untuk terus memantau informasi lowongan dari instansi, perusahaan, maupun berbagai kanal rekrutmen resmi yang sesuai dengan bidang yang diminati. Semoga segera memperoleh kesempatan kerja yang terbaik.		

	17/06	Sekda	rAKOR eV Stunting	Upaya menurunkan stunting tidak hanya membutuhkan program yang berjalan, tetapi juga evaluasi agar setiap intervensi yang dilakukan tetap sesuai dengan kondisi di lapangan. Rabu (17/6/2026), Sekda Anang Armunanto memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting serta tindak lanjut Surat Edaran Intervensi Stunting Serentak Tahun 2026 yang berlangsung di Dinas Kesehatan. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Grobogan Ibu Suyatun Setyo Hadi, Kepala Bapperida, perangkat daerah terkait, 30 dokter, 30 nutrisisionis, serta narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, Dakhlan Choeron. Dalam arahannya, Sekda mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pelaksanaan program, mulai dari ketepatan penimbangan dan pengukuran balita, kelayakan alat antropometri, hingga pencatatan dan pelaporan data. Menurutnya, data yang baik diperlukan agar intervensi yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran. Sekda juga mengajak perangkat daerah mencermati faktor-faktor penyebab stunting agar penanganan dapat saling melengkapi. Berdasarkan pemantauan Maret 2026, sekitar 94,7 persen balita telah mengikuti penimbangan dan pengukuran. Penguatan kapasitas kader serta perbaikan sarana pendukung juga menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas layanan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, dr. Jatmiko, mengingatkan bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan kerja sama lintas sektor. Data yang akurat, pendampingan, serta evaluasi berkala menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya. Forum ini juga diisi sesi diskusi dan tanya jawab untuk menghimpun berbagai tantangan, pengalaman, dan masukan dari para pelaksana di lapangan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bersama. Melalui evaluasi dan kolaborasi yang terus diperkuat, berbagai tantangan di lapangan diharapkan dapat direspons dengan langkah yang lebih tepat dan terukur. Dengan begitu, upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak berhenti pada pelaksanaan program, tetapi hadir melalui pendampingan, pemantauan, dan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pemkabgrobogan #stunting #grobogan	https://www.instagram.com/p/DZrionyGG6V/?img_index=1
--	-------	-------	-------------------	--	---

	17/06	Sekda	rAKOR eV Stunting	Grobogan Perkuat Evaluasi dan Kolaborasi untuk Optimalkan Intervensi Stunting Purwodadi – Upaya menurunkan stunting tidak hanya membutuhkan program yang berjalan, tetapi juga evaluasi agar setiap intervensi yang dilakukan tetap sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan memahami berbagai tantangan yang dihadapi, langkah perbaikan dapat disusun lebih tepat sehingga dukungan yang diberikan benar-benar menjangkau anak dan keluarga yang membutuhkan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting serta tindak lanjut Surat Edaran Intervensi Stunting Serentak Tahun 2026 di Dinas Kesehatan, Rabu (17/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bapperida, Ketua TP PKK Kabupaten Grobogan Suyatun Setyo Hadi, dokter, nutrisisionis, perangkat daerah terkait, serta berbagai pihak yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Grobogan. Dalam arahnya, Sekda mengingatkan bahwa target prevalensi stunting Kabupaten Grobogan pada tahun 2026 sebesar 17,65 persen dan ditargetkan turun menjadi 14,90 persen pada akhir periode RPJMD. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan sinergi yang kuat serta evaluasi berkelanjutan terhadap berbagai upaya yang telah berjalan. Menurutnya, data yang valid menjadi salah satu kunci agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran. Karena itu, berbagai informasi yang tersedia perlu dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk melihat tantangan yang masih dihadapi sekaligus menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. "Kita analisis bersama. Apa yang perlu diperbaiki, apa tantangan yang dihadapi di lapangan, dan bagaimana memastikan intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran," ujarnya. Sekda juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita. Evaluasi perlu dilakukan secara berkala terhadap berbagai aspek pendukung, mulai dari sarana yang digunakan, pelaksanaan pengukuran, hingga cakupan pemantauan di lapangan, agar data yang dihasilkan semakin akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan intervensi yang tepat. Menurutnya, berbagai tantangan yang ditemui di lapangan perlu dipandang sebagai bahan perbaikan bersama. Melalui identifikasi kendala secara terbuka, pemerintah daerah dapat menyusun langkah tindak lanjut yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Sekda juga mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan sektor swasta, serta meminta Dinas Kesehatan menyusun dan mendistribusikan standar pelayanan edukasi stunting yang dapat digunakan kader, termasuk Tim Penggerak PKK, agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat lebih seragam. Tidak hanya menjadi forum penyampaian arahan, rakor tersebut juga diisi sesi diskusi dan tanya jawab untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Masukan dari peserta diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan pelaksanaan intervensi di masing-masing wilayah. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, dr. Jatmiko, menegaskan bahwa pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan semata. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas program agar berbagai intervensi yang dilakukan dapat saling melengkapi. Ia menyebut forum tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi, memperkuat verifikasi dan validasi data secara berkala, memastikan intervensi berjalan sesuai standar, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. "Data yang akurat dan pelaksanaan yang benar menjadi kunci agar intervensi yang diberikan tepat sasaran. Pendampingan juga perlu terus diperkuat," ujarnya. Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI, Dakhlan Choeron, untuk memberikan penguatan terkait pelaksanaan intervensi stunting di daerah. Melalui evaluasi yang berkelanjutan, keterbukaan terhadap berbagai masukan, dan penguatan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap upaya percepatan penurunan stunting dapat semakin efektif sehingga semakin banyak anak tumbuh sehat dan memperoleh kesempatan berkembang secara optimal sejak usia dini. (jsa)	https://setda.grobogan.go.id/index.php/profil/asisten-sekda/administrasi/bag-protokol-komunikasi-pimpinan/grobogan-perkuat-evaluasi-dan-kolaborasi-untuk-optimalkan-intervensi-stunting
--	-------	-------	-------------------	--	---

	17/06	Sekda	uJI gAGASAN JPT	Setiap jabatan memiliki tantangan dan tanggung jawab yang berbeda. Karena itu, proses seleksi tidak hanya melihat kompetensi yang dimiliki, tetapi juga kesiapan peserta dalam memahami persoalan serta menghadirkan gagasan yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Rabu (17/6/2026), Sekda Anang Armunanto selaku Ketua Panitia Seleksi bersama tim melaksanakan tahapan presentasi uji gagasan makalah dan wawancara dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Purwodadi. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari. Pada hari pertama, tahapan seleksi diikuti peserta yang melamar formasi Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia serta Direktur RSUD Dr. R. Soedjati Soemodardjo. Setiap peserta memperoleh waktu 40 menit, terdiri atas 10 menit presentasi makalah dan 30 menit wawancara. Melalui tahapan ini, panitia seleksi menggali kemampuan berpikir strategis, kualitas gagasan, serta kesiapan peserta dalam menjalankan tugas jabatan yang dilamar. Peserta memaparkan gagasan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah sekaligus menawarkan solusi terhadap berbagai tantangan sesuai bidang tugas yang akan diemban. Formasi Staf Ahli Bupati diharapkan mampu memberikan pertimbangan terhadap berbagai isu strategis di bidang sosial dan sumber daya manusia, sementara Direktur RSUD dituntut memastikan tata kelola rumah sakit dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Uji gagasan makalah dan wawancara menjadi bagian dari rangkaian seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Melalui tahapan ini, panitia seleksi memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kompetensi dan kesiapan peserta sebelum hasil seluruh proses seleksi disampaikan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #JPTPratama #ASNBerAKHLAK		https://www.instagram.com/p/DZtTf1hmHzS/?img_index=1
--	-------	-------	-----------------	--	--	---

	18/06	Sekda	uJI gAGASAN JPT	Setiap kebijakan dan program pembangunan pada akhirnya dijalankan oleh orang-orang yang berada di baliknya. Karena itu, pengisian jabatan strategis perlu melalui proses yang mampu melihat tidak hanya kompetensi, tetapi juga kesiapan dalam menjawab tantangan sesuai bidang tugas yang akan diemban. Kamis (18/6/2026), Sekda Anang Armunanto selaku Ketua Panitia Seleksi bersama tim kembali melaksanakan presentasi uji gagasan makalah dan wawancara dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Purwodadi. Hari kedua seleksi diikuti peserta yang melamar formasi Kepala Dinas Pertanian, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). Setiap peserta memperoleh waktu 40 menit, terdiri atas 10 menit presentasi makalah dan 30 menit wawancara. Pada tahap ini, panitia seleksi menggali kemampuan berpikir strategis, kualitas gagasan, serta kesiapan peserta menjalankan tugas jabatan yang dilamar. Peserta memaparkan gagasan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Di sektor pertanian, dibutuhkan langkah yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani. Pada bidang perekonomian dan pembangunan, diperlukan kemampuan menyinergikan program agar berjalan selaras, efektif, dan tepat sasaran. Sementara di sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan, layanan yang mudah, cepat, dan akuntabel menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Uji gagasan makalah dan wawancara merupakan bagian dari rangkaian seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Tahapan ini memberi ruang bagi panitia seleksi untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kompetensi dan kesiapan peserta sebelum hasil seluruh proses seleksi disampaikan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Melalui proses yang berlangsung secara terbuka dan bertahap, pemerintah daerah berupaya memastikan jabatan strategis diisi oleh aparatur yang kompeten, memahami bidang tugasnya, serta mampu menerjemahkan kebijakan menjadi langkah yang bermanfaat bagi masyarakat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #JPTPratama #ASNBerAKHLAK		https://www.instagram.com/p/DZv8riuGB5W/?img_index=1
--	-------	-------	-----------------	--	--	---

	18/06	Sekda	Hasil JPT	Setiap tahapan seleksi terbuka memiliki perannya masing-masing. Setelah rangkaian penilaian dilalui, hasilnya perlu dicermati bersama secara saksama agar setiap keputusan didasarkan pada pertimbangan yang menyeluruh dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kamis (18/6/2026), usai pelaksanaan presentasi uji gagasan makalah dan wawancara, Sekda Anang Armunanto selaku Ketua Panitia Seleksi memimpin Rapat Koordinasi Penetapan Hasil Akhir Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2026. Rapat tersebut menjadi bagian dari tahapan akhir kerja panitia seleksi setelah seluruh proses penilaian dilaksanakan, mulai dari seleksi administrasi, uji kompetensi, hingga presentasi gagasan dan wawancara. Melalui forum ini, hasil dari setiap tahapan dicermati kembali sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan hasil akhir seleksi. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada hasil penilaian yang menyeluruh terhadap kompetensi, rekam jejak, serta kesiapan peserta sesuai kebutuhan jabatan yang dilamar. Hasil akhir yang telah dirumuskan oleh panitia seleksi selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai mekanisme yang berlaku. Melalui proses seleksi yang berlangsung secara terbuka dan kompetitif, pemerintah daerah berupaya memastikan jabatan strategis diisi oleh aparatur yang memiliki kompetensi, memahami bidang tugasnya, serta siap menjalankan amanah jabatan demi mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #JPTPratama #ASNBerAKHLAK	https://www.instagram.com/p/DZwIshcmA1_/?img_index=1
--	-------	-------	-----------	---	---

19/06	Sekda	Beomho	Sebelum sebuah inovasi diterapkan, ada proses persiapan yang perlu dimatangkan bersama. Mulai dari menyamakan kebutuhan, memperjelas ruang lingkup program, hingga menyiapkan berbagai hal yang diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana. Jumat (19/6/2026), Sekda Anang Armunanto bersama Bapperida Kabupaten Grobogan menerima kunjungan Mr. Jayden Shin, Chief Technology Officer PT Beomho Technology Service, sebagai tindak lanjut program hibah Smart City dari Pemerintah Korea Selatan yang akan diimplementasikan di Kabupaten Grobogan. Pertemuan tersebut membahas perkembangan persiapan menuju kick off Smart PSC 119 Kabupaten Grobogan yang telah terpilih dalam program hibah teknologi melalui skema National IT Industry Promotion Agency (NIPA) Korea Selatan. Pembahasan difokuskan pada ruang lingkup program sekaligus berbagai kesiapan yang diperlukan agar implementasinya dapat berjalan sesuai tahapan yang telah disepakati. Selain meninjau perkembangan Smart PSC 119, pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut juga menjadi ruang bertukar pengalaman mengenai berbagai pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelayanan publik dan keselamatan masyarakat. Berbagai persiapan tersebut menjadi bagian dari upaya agar pemanfaatan teknologi dapat mendukung pelayanan publik yang semakin responsif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #SmartCity #grobogan	https://www.instagram.com/p/DZwiOH4mL39/?img_index=1
19/06	Sekda	BKK	Komunikasi yang baik menjadi salah satu cara untuk menjaga sinergi dan memperkuat pemahaman dalam menjalankan peran masing-masing. Jumat (19/6/2026), Sekda Anang Armunanto menerima kunjungan Komisaris dan Direktur PT BKK Purwodadi di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat sebagai ajang silaturahmi sekaligus mempererat komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dan PT BKK Purwodadi. Sebagai salah satu BUMD di Kabupaten Grobogan, PT BKK Purwodadi memiliki kedekatan dengan masyarakat melalui layanan yang dijalankan. Karena itu, komunikasi dan koordinasi yang terus terjaga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan peran masing-masing dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #BUMD #grobogan	https://www.instagram.com/p/DZzwb2oGJZA/?img_index=1

19/06	Sekda	KONI	Di balik berbagai kegiatan olahraga yang terlihat di lapangan, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan dan dikelola dengan baik. Tidak hanya pembinaan atlet dan pelaksanaan pertandingan, tetapi juga aspek administrasi serta tata kelola yang menjadi bagian dari penyelenggaraannya. Jumat (19/6/2026), Sekda Anang Armunanto didampingi Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD dan Kepala Bagian Hukum Setda menerima audiensi KONI Kabupaten Grobogan di ruang kerjanya. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat sebagai ajang silaturahmi sekaligus konsultasi terkait pelaksanaan kegiatan di lingkungan KONI. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana hibah pemerintah. Karena menggunakan dana yang berasal dari APBN maupun APBD, setiap tahapan pengadaan perlu mengacu pada pedoman teknis dan ketentuan yang berlaku. Prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel menjadi landasan agar pelaksanaannya berjalan tertib serta dapat dipertanggungjawabkan. Melalui komunikasi dan penyamaan pemahaman seperti ini, berbagai program dan kegiatan olahraga diharapkan dapat berjalan dengan baik, sehingga fokus pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga dapat terus dilakukan dengan dukungan tata kelola yang sesuai ketentuan. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #KONI #grobogan	https://www.instagram.com/p/DZ1TvuNmD7W/?img_index=1
19/06	Sekda	Nobar	Piala Dunia selalu punya caranya sendiri untuk menghadirkan kebersamaan. Dari warung kopi hingga halaman rumah, pertandingan sering menjadi alasan sederhana bagi orang-orang untuk berkumpul, berbincang, dan berbagi semangat yang sama. Momentum inilah yang turut mendapat perhatian pemerintah daerah agar antusiasme masyarakat dapat terwadahi dengan baik, tetap tertib, serta memberi manfaat yang lebih luas. Jumat (19/6/2026), Sekda Anang Armunanto memimpin rapat koordinasi di Ruang Rapat Sekda untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026. Rapat diikuti Inspektur Daerah, Kepala Bapperida, Kepala Disperindag, Kepala Disporabudpar, Kepala Bagian Ekonomi, serta perangkat daerah terkait. Berbagai kesiapan dibahas bersama, mulai dari kemungkinan lokasi pelaksanaan, dukungan lintas perangkat daerah, aspek keamanan dan ketertiban, hingga peluang keterlibatan UMKM dalam kegiatan yang akan diselenggarakan sesuai kondisi dan kemampuan daerah. Bagi sebagian masyarakat, nonton bareng mungkin sekadar hiburan. Namun di sisi lain, kegiatan seperti ini juga dapat menjadi ruang pertemuan yang menghidupkan aktivitas ekonomi warga di sekitarnya. Karena itu, koordinasi dilakukan sejak awal agar masyarakat dapat menikmati suasana Piala Dunia dengan nyaman, sementara pelaksanaannya tetap memperhatikan keamanan, ketertiban, dan ketentuan yang berlaku. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #PialaDunia2026 #grobogan	https://www.instagram.com/p/DZ1aqYjmEjN/?img_index=1

	22/06	Sekda	Pariwara Antikorupsi	Tidak ada orang yang tiba-tiba terlibat dalam pelanggaran besar dalam satu malam. Sering kali, semuanya berawal dari hal-hal kecil yang dianggap lumrah, dimaklumi, atau dibiarkan terjadi berulang kali. Menerima pemberian karena jabatan. Menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Titip absen. Menerima imbalan atas layanan yang memang menjadi tugas. Bermain gim atau menikmati hiburan saat jam kerja hingga mengabaikan pekerjaan dan pelayanan. Sekilas mungkin tampak sepele. Namun ketika kebiasaan tersebut dibiarkan, batas antara yang boleh dan tidak boleh perlahan menjadi kabur. Karena itu, menjaga integritas bukan hanya tentang menolak korupsi dalam bentuk yang besar. Ia hadir dalam pilihan-pilihan sederhana setiap hari: bekerja dengan jujur, menggunakan kewenangan secara tepat, mematuhi aturan, serta tetap profesional dalam menjalankan amanah. Pemerintahan yang bersih dibangun dari kebiasaan yang baik. Dimulai dari hal-hal kecil, dilakukan secara konsisten, dan diawali dari diri sendiri. @official.kpk @suaraantikorupsi.kpk @aclc.kpk #sekdagrobogan #setdagrobogan #PariwaraAntiKorupsi #BerAKHLAK #AntikorupsiGrobogan		https://www.instagram.com/p/DZ34c88S46Q/
	22/06	Sekda	ADUAN	Terima kasih atas perhatian serta kontribusi GCC dalam membawa nama baik Kabupaten Grobogan. Aspirasi yang disampaikan akan kami teruskan kepada perangkat daerah terkait untuk menjadi perhatian lebih lanjut. Semoga semangat kreatif yang telah dibangun dapat terus berkembang dan menginspirasi.		

	22/06	Sekda	PEKPP	Pelayanan publik yang baik sering kali tampak dari hal-hal sederhana: kejelasan persyaratan, kepastian waktu layanan, kemudahan akses informasi, serta kejelasan kapan urusan masyarakat dapat diselesaikan. Karena itu, evaluasi tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan indikator, tetapi sebagai upaya memastikan pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan terus membaik. Senin (22/6/2026), Sekda Anang Armunanto memberikan arahan secara daring kepada perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2026. Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas utama ASN. Evaluasi, baik melalui PEKPPP maupun instrumen lain, perlu dipandang sebagai ruang untuk melihat kembali apa yang sudah berjalan dan apa yang perlu diperbaiki. Ia juga menekankan pentingnya membedakan Standar Pelayanan dan SOP. Standar Pelayanan merupakan janji layanan kepada masyarakat yang perlu disusun dan diinformasikan secara terbuka, agar masyarakat mengetahui hak dan alur layanan secara jelas. Menurutnya, keterbukaan informasi layanan dapat mengurangi banyak persoalan di lapangan. Di sisi lain, Survei Kepuasan Masyarakat perlu ditindaklanjuti, bukan sekadar formalitas, termasuk hasil dan langkah perbaikan yang benar-benar dijalankan di unit layanan. Perhatian juga diberikan pada kepastian jam layanan yang konsisten, kehadiran petugas sesuai waktu pelayanan, sarana bagi kelompok rentan, serta kemudahan akses pengaduan yang dapat digunakan masyarakat ketika membutuhkan respon cepat dari layanan. Masyarakat yang datang telah meluangkan waktu dan tenaga, sehingga layak mendapatkan pelayanan yang jelas, ramah, dan dapat diandalkan. "Ini bagian dari kontribusi kita untuk masyarakat," ujar Sekda. Pelayanan publik pada akhirnya tidak hanya soal penilaian, tetapi tentang menjaga kepercayaan melalui layanan yang terus diperbaiki, terbuka terhadap masukan, dan hadir menjawab kebutuhan warga secara nyata. Dengan begitu, pelayanan tidak berhenti pada prosedur, tetapi terasa dalam pengalaman masyarakat sehari-hari. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pemkabgrobogan #PEKPPP #Pelayananpublik	https://www.instagram.com/p/DZ4JTzgmG-t/?img_index=1
--	-------	-------	-------	---	--

	22/06	Sekda	PEKPP	Grobogan Siapkan Penguatan Kinerja Pelayanan Publik melalui PEKPPP 2026 Purwodadi – Kualitas pelayanan publik pada dasarnya ditentukan oleh konsistensi perbaikan di lapangan, bukan semata dari hasil penilaian. Karena itu, setiap proses evaluasi dipandang penting sebagai ruang untuk memastikan layanan pemerintah tetap berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi penekanan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, saat memberikan arahan secara daring dalam rangka Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026, Senin (22/6/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri PANRB terkait pelaksanaan PEKPPP Tahun 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga 31 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya pengukuran dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah. Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa tugas aparatur tidak hanya dipahami dalam konteks pemenuhan indikator penilaian, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa berbagai instrumen evaluasi yang ada, baik dari Kementerian PANRB maupun lembaga pengawas lainnya seperti Ombudsman, pada dasarnya memiliki fokus yang saling melengkapi dalam mendorong perbaikan kualitas layanan publik di setiap lini. Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan indikator administratif, tetapi harus menjadi ruang pembenahan berkelanjutan agar pelayanan publik semakin tertib, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah, fasilitas layanan kesehatan, satuan pendidikan, dan unit pelayanan lainnya yang selama ini terus berupaya meningkatkan kualitas layanan di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan. Sejalan dengan itu, ia mengingatkan agar berbagai hal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang bersifat non-substansi dan berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja layanan, dapat dikelola dengan baik. Hal tersebut penting agar fokus utama tetap terjaga pada peningkatan kualitas pelayanan, sehingga standar layanan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Sekda menekankan pentingnya penguatan lima aspek utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pertama, terkait Standar Pelayanan (SP). Ia menegaskan bahwa SP berbeda dengan SOP. SP merupakan acuan layanan kepada masyarakat yang memuat syarat, prosedur, biaya, serta jangka waktu pelayanan yang harus disampaikan secara jelas dan terbuka. Standar pelayanan yang tidak dikomunikasikan dengan baik berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, sehingga perlu dipublikasikan melalui berbagai kanal informasi seperti papan layanan, media sosial, maupun laman resmi. Kedua, terkait Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Sekda mendorong agar SKM tidak hanya dilakukan sebagai formalitas, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai alat evaluasi untuk melihat kualitas layanan serta dasar perbaikan berkelanjutan. Ketiga, terkait waktu layanan. Ia mengingatkan pentingnya kepastian jam pelayanan agar masyarakat tidak mengalami ketidakpastian saat mengakses layanan, termasuk pengaturan petugas secara bergantian agar pelayanan tetap berjalan pada jam yang telah ditetapkan. Keempat, terkait sarana prasarana, khususnya bagi kelompok rentan. Sekda menegaskan bahwa penyediaan fasilitas layanan harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya, sehingga pelayanan dapat diberikan secara lebih inklusif. Kelima, terkait sarana publikasi dan kanal informasi layanan. Ia menekankan pentingnya ketersediaan media informasi, baik elektronik maupun non-elektronik, sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk sebagai kanal pengaduan dan penyampaian informasi layanan. Sekda juga mengingatkan agar setiap perangkat daerah tidak alergi terhadap kritik, karena masukan dari masyarakat merupakan bagian dari kontrol sosial yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas layanan. Dalam arahannya, Sekda juga menegaskan bahwa PEKPPP merupakan instrumen untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kualitas pelayanan publik di daerah, sekaligus menjadi dasar perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan di seluruh unit layanan.	https://setda.grobogan.go.id/index.php/profil/asisten-sekda/administrasi/bag-organisasi/sekda-grobogan-tekanan-penguatan-standar-dan-kinerja-pelayanan-publik-dalam-pekppp-2026
--	-------	-------	-------	--	---

	22/06	Sekda	SHS	Pengelolaan anggaran daerah pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan angka dan aturan, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan dapat dijalankan secara wajar, patuh, dan sesuai kebutuhan di lapangan. Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekda Anang Armunanto, Senin (22/6/2026), bersama BPPKAD, BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta Kabag Hukum Setda di Ruang Rapat Sekda. Rapat membahas penyesuaian Standar Harga Satuan Regional sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD, seiring terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025. Dalam pembahasan tersebut, berlangsung diskusi dan tanya jawab antara peserta rapat, terutama terkait penyesuaian beberapa komponen belanja serta penerapannya di masing-masing perangkat daerah, dengan penguatan penjelasan dari unsur terkait di lingkungan Setda. Regulasi ini pada dasarnya menjadi acuan dalam sejumlah komponen belanja daerah, mulai dari honorarium, perjalanan dinas, rapat, hingga pemeliharaan dan pengadaan barang, dengan pengaturan batasan serta ruang fleksibilitas tertentu. Sekda menekankan pentingnya memahami ketentuan ini secara utuh agar penyesuaian yang dilakukan tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku, serta dapat diterapkan sesuai kondisi dan kebutuhan di masing-masing perangkat daerah. Sejumlah hal teknis turut dibahas, termasuk batasan honorarium, standar perjalanan dinas, serta komponen biaya lain yang perlu disesuaikan dalam pelaksanaan ke depan. Melalui proses penyesuaian ini, pemerintah daerah berupaya menjaga agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran tetap berada dalam koridor aturan, namun tetap relevan dengan kebutuhan kerja di lapangan. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #APBD #TataKelolaPemerintahan		https://www.instagram.com/p/DZ4YGS5mHRv/?img_index=1
--	-------	-------	-----	---	--	---

	22/06	Sekda	Raperda Perangkat Desa	Pemerintahan desa menjadi salah satu garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, regulasi yang mengaturnya perlu terus disesuaikan agar tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan, dinamika penyelenggaraan pemerintahan, serta perubahan kebijakan di tingkat nasional. Senin (22/6/2026), Sekda Anang Armunanto memimpin rapat koordinasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perangkat Desa di Ruang Rapat Sekda. Hadir dalam rapat tersebut Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, BKPSDM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Bagian Hukum Setda. Pembahasan dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Berbagai substansi dibahas bersama, mulai dari penyempurnaan pengaturan mengenai perangkat desa, penguatan aspek kewajiban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, hingga penyesuaian sejumlah ketentuan agar selaras dengan kerangka hukum yang berlaku. Diskusi juga berlangsung untuk menghimpun berbagai pandangan dan pertimbangan atas beberapa materi yang masih memerlukan pendalaman lebih lanjut, sehingga setiap ketentuan yang dirumuskan dapat dipahami dan diterapkan dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berbagai masukan dan pertimbangan yang dihimpun dalam pembahasan ini akan menjadi bagian dari penyempurnaan materi Raperda sebelum dibahas lebih lanjut bersama DPRD sesuai tahapan yang berlaku. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembagrobogan #PemerintahanDesa #PerangkatDesa	https://www.instagram.com/p/DZ4zYi-GLwv/?img_index=1
--	-------	-------	------------------------	---	---

	22/06	Sekda	Manajemen Talenta	Penguatan pelayanan publik tidak hanya bertumpu pada sistem kerja, tetapi juga pada bagaimana aparatur disiapkan, dikembangkan, dan ditempatkan sesuai kompetensi dan kinerjanya. Hal tersebut menjadi bagian dari paparan BKPSDM kepada Sekda Anang Armunanto, Senin (22/6/2026), di Ruang Rapat Sekda, terkait kesiapan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam penerapan Manajemen Talenta ASN. Manajemen talenta merupakan bagian dari sistem merit yang menekankan pengelolaan ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara objektif. Pendekatan ini diarahkan untuk memperkuat pengembangan ASN agar lebih terukur, dari pemetaan potensi hingga penyiapan kebutuhan organisasi. Dalam paparan tersebut, kesiapan penerapan dijelaskan melalui beberapa aspek yang saling melengkapi. Dari sisi kelembagaan, penguatan ditopang komitmen kepala daerah, tim kerja dan komite talenta, serta regulasi yang telah ditetapkan. Pada aspek sistem informasi, disampaikan pengembangan pengelolaan data ASN melalui integrasi SIMATA dengan sistem BKN dan SIASN, termasuk dukungan data yang saling terhubung serta pembaruan data mandiri secara berkala. Pada aspek desain manajemen talenta, disiapkan instrumen seperti pemetaan jabatan target, 9 kotak talenta, rencana suksesi, hingga Individual Development Plan sebagai kerangka pengembangan ASN. Dari sisi implementasi, dipaparkan rencana penguatan melalui pemetaan kinerja dan potensi ASN, dukungan komite talenta, serta penyusunan daftar suksesor berbasis kualifikasi dan rekam jejak. Adapun pada aspek budaya, penguatan dilakukan melalui sosialisasi sistem merit dan manajemen talenta, serta forum berbagi pengetahuan di lingkungan ASN. Lebih dari sekadar sistem, arah manajemen talenta ini diharapkan menjadi kerangka penguatan ekosistem kerja yang lebih sehat, di mana ASN memiliki ruang untuk tumbuh sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Arah ini diharapkan dapat membantu penempatan aparatur menjadi lebih tepat, organisasi semakin efektif, dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih optimal serta responsif. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #ASNBerAKHLAK #ManajemenTalanta	https://www.instagram.com/p/DZ6PKYtGBKy/?img_index=1
--	-------	-------	-------------------	---	---

	23/06	Sekda	Gowes Kerja Bakti	Menjaga lingkungan kerja yang bersih dan nyaman sering kali dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan bersama. Selasa (23/6/2026), Sekda Anang Armunanto seperti biasa berangkat ke kantor dengan bersepeda. Di perjalanan, ia sempat beriringan dengan rombongan remaja yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk bersepeda menikmati suasana pagi. Setibanya di kompleks perkantoran, kegiatan dilanjutkan dengan kerja bakti lingkungan. Sekda menyapa pegawai BPPKAD yang tengah membersihkan area trotoar depan kantor, kemudian meninjau pegawai Setda yang bergotong royong merapikan area belakang kantor hingga musala. Kerja bakti bukan sekadar kegiatan rutin menjaga kebersihan. Di dalamnya ada kepedulian terhadap lingkungan bersama serta semangat gotong royong yang menjadi bagian dari budaya kerja. Semangat tersebut sejalan dengan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman secara berkelanjutan. Lingkungan yang terawat diharapkan dapat menghadirkan kenyamanan, baik bagi pegawai dalam bekerja maupun masyarakat yang datang memperoleh pelayanan. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembagrobogan #IndonesiaASRI #Grobogan		https://www.instagram.com/p/DZ6zXGBSTd3/
--	-------	-------	-------------------	--	--	---

	23/06	Sekda	Pemusnahan BB	Sebuah perkara tidak berhenti ketika putusan dibacakan di pengadilan. Masih ada tahapan lanjutan yang harus dijalankan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pemusnahan barang bukti tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif ataupun seremonial. Di dalamnya terdapat rangkaian proses penegakan hukum yang memastikan setiap perkara yang telah diputus benar-benar ditindaklanjuti hingga tuntas. Mewakili Bupati Grobogan Bapak Setyo Hadi, Sekda Anang Armunanto menghadiri kegiatan Pemusnahan Barang Bukti yang diselenggarakan Kejaksaan Negeri Grobogan, Selasa (23/6/2026), di halaman kantor Kejari Grobogan. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari berbagai perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), mulai dari narkoba seperti sabu, ganja, tembakau sintetis, hingga senjata tajam, barang berbahaya lain, serta barang bukti lain sesuai putusan pengadilan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemkab Grobogan dan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di daerah. Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan apresiasi Pemkab Grobogan kepada Kejaksaan Negeri Grobogan beserta jajaran atas sinergi yang selama ini terjalin dalam penegakan hukum di wilayah Kabupaten Grobogan. Ia menekankan bahwa setiap pelanggaran hukum membawa konsekuensi yang harus dipahami bersama, sekaligus menjadi pengingat penting bagi upaya pencegahan ke depan. Di sisi lain, upaya menjaga keamanan dan ketertiban tidak hanya bertumpu pada penindakan, tetapi juga membutuhkan penguatan langkah preventif serta edukasi kepada masyarakat. Pemkab Grobogan berkomitmen terus bersinergi dengan aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing, termasuk memperkuat pencegahan agar kesadaran hukum masyarakat tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian kegiatan ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada putusan, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan serta kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga ketertiban masyarakat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pemkabgrobogan #KejariGrobogan #Grobogan		https://www.instagram.com/p/DZ7KhG-SOD4/
--	-------	-------	---------------	---	--	---

	23/06	Sekda	Dewas	Pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya diukur dari fasilitas yang tersedia, tetapi juga dari kesungguhan untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki diri. Sebab, di balik setiap layanan, ada harapan, kekhawatiran, dan kepercayaan masyarakat yang ditiptkan kepada rumah sakit. Sebagai Ketua Dewan Pengawas RSUD Dr. R. Soedjati Soemodardjo, Sekda Anang Armunanto menghadiri Survei Simulasi Akreditasi yang dilaksanakan Lembaga Akreditasi Damar Husada Paripurna pada 23–24 Juni 2026 di Ruang Rapat II RSUD Dr. Soedjati Soemodardjo. Kegiatan ini turut dihadiri Plt. Direktur RSUD beserta jajaran manajemen dan komite. Survei simulasi merupakan tahapan penting sebelum penilaian akreditasi sesungguhnya. Melalui proses ini, rumah sakit dapat mengukur kesiapan sekaligus mengenali hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Berbagai aspek ditelaah, mulai dari telusur dokumen, wawancara pimpinan, telaah rekam medis, hingga telusur lapangan pada unit pelayanan. Tim survei juga melakukan telusur KPS (Kualifikasi dan Pendidikan Staf) untuk memastikan kesiapan kompetensi, kredensial, serta pengembangan sumber daya manusia sesuai standar akreditasi. Hasilnya kemudian dibahas dalam laporan survei dan exit conference sebagai bahan tindak lanjut perbaikan. Bagi rumah sakit, proses ini bukan sekadar memenuhi standar penilaian. Yang dijaga adalah mutu pelayanan dan keselamatan pasien agar setiap orang yang datang memperoleh layanan yang aman dan dapat diandalkan. Simulasi ini juga menjadi ruang belajar bersama untuk memperkuat hal-hal yang sudah berjalan baik serta membenahi bagian yang masih perlu ditingkatkan. Tidak hanya kesiapan dokumen, tetapi juga konsistensi penerapan prosedur, koordinasi antarunit, hingga budaya keselamatan dalam pelayanan sehari-hari. Menjaga mutu pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah ikhtiar yang terus dirawat, agar layanan yang diberikan semakin baik dan semakin dapat dipercaya oleh masyarakat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembagrobogan #RSUDGrobogan #PelayananKesehatan		https://www.instagram.com/p/DZ9HghmO8r/?img_index=1
--	-------	-------	-------	--	--	---

	25/06	Sekda	Manajemen Talenta	Penguatan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menduduki jabatan hari ini, tetapi juga oleh sejauh mana organisasi mampu menyiapkan aparatur untuk menjawab kebutuhan di masa mendatang. Karena itu, pengembangan manajemen talenta menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat sistem merit di lingkungan pemerintahan. Bupati Grobogan Bapak Setyo Hadi didampingi Sekda Anang Armunanto bersama tim BKPSDM melaksanakan ekspose penerapan Manajemen Talenta ASN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan di hadapan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Ruang Data Gedung 1 Lantai 2 BKN Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan komitmen Pemkab Grobogan untuk terus memperkuat pengelolaan ASN berbasis kompetensi, kinerja, dan pengembangan potensi aparatur. Sementara itu, Sekda memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan, mulai dari penguatan regulasi, pembentukan Komite Talenta, pengembangan sistem pendukung, hingga pemetaan potensi dan kinerja ASN yang terintegrasi dengan sistem BKN. Saat ini Pemkab Grobogan mengelola lebih dari 15 ribu ASN yang terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Pengembangan manajemen talenta diarahkan untuk mendukung perencanaan suksesi jabatan, pengembangan kompetensi, serta penempatan aparatur sesuai kebutuhan organisasi. Dengan demikian, pengembangan ASN tidak hanya berfokus pada pemenuhan jabatan, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia untuk mendukung pelayanan publik. Dalam paparan tersebut juga disampaikan sejumlah hal yang masih perlu diperkuat, antara lain asesmen kompetensi, optimalisasi penilaian kinerja dan perilaku, budaya apresiasi di perangkat daerah, serta penataan administrasi penugasan untuk memperkuat data talenta ASN. Ekspose ini menjadi ruang evaluasi dan pembelajaran bersama agar pengembangan manajemen talenta tetap selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan organisasi. Proses ini juga menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang lebih adaptif, sehingga aparatur memiliki ruang berkembang sesuai kompetensinya dan organisasi lebih siap menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pemkabgrobogan #ASNBerAKHLAK #ManajemenTalanta	https://www.instagram.com/p/DaAraRcBxle/
--	-------	-------	-------------------	---	---

	26/06	Sekda	AKIP	Grobogan Perkuat Akuntabilitas Kinerja untuk Dukung Pencapaian Target Pembangunan Daerah Purwodadi – Masyarakat tentu berharap setiap anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar diwujudkan dalam pembangunan dan pelayanan publik yang sesuai kebutuhan. Karena itu, setiap program tidak cukup hanya dilaksanakan, tetapi juga perlu direncanakan dengan baik, diukur hasilnya, dievaluasi secara berkala, dan terus diperbaiki agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan terus memperkuat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai instrumen yang memastikan setiap perangkat daerah menyusun program, melaksanakan kegiatan, dan mengelola anggaran secara selaras dengan tujuan serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Upaya tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, di Ruang Rapat Wakil Bupati, Jumat (26/6/2026). Rapat dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekda, Inspektur Daerah, Kepala BPPKAD, Sekretaris Bapperida, serta Tim Evaluator AKIP Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa evaluasi AKIP tidak dimaknai sebagai upaya meningkatkan nilai evaluasi semata. Lebih dari itu, evaluasi merupakan bagian dari proses untuk memastikan setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi, berjalan secara utuh dan saling mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Menurutnya, setiap program dan kegiatan perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan tujuan pembangunan dalam RPJMD sehingga seluruh perangkat daerah bergerak menuju arah yang sama. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administrasi, tetapi menjadi dasar untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memberikan kontribusi yang terukur terhadap target pembangunan daerah. Sekda juga mengingatkan bahwa penguatan AKIP tidak dapat hanya mengandalkan Bagian Organisasi. Tim evaluator dari berbagai perangkat daerah perlu mengambil peran aktif sesuai pembagian tugas masing-masing dengan menyusun rencana aksi, mendampingi perangkat daerah mitra, serta mengawal tindak lanjut hasil evaluasi agar proses perbaikan dapat berjalan secara berkelanjutan. Ia meminta seluruh tim mencermati hasil evaluasi tahun sebelumnya secara kritis dan menerjemahkan setiap rekomendasi ke dalam langkah-langkah perbaikan yang nyata. Selain penyempurnaan aspek perencanaan, Sekda juga mengingatkan pentingnya memperkuat kualitas pelaporan kinerja melalui analisis yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala pencapaian program. Menurutnya, setiap perangkat daerah perlu memastikan informasi yang disajikan dalam laporan tersusun secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga benar-benar menjadi dasar dalam mengevaluasi capaian kinerja, merumuskan langkah perbaikan, serta mendukung pengambilan keputusan pada periode berikutnya. Dalam rapat tersebut juga dibahas penyusunan rencana tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, jadwal pelaksanaan evaluasi internal tahun 2026, optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Laporan AKIP (SILAKIP), serta pembagian tugas Tim Evaluator agar proses pendampingan dan evaluasi dapat berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan tepat waktu. Kabupaten Grobogan terus melakukan penyempurnaan sistem akuntabilitas kinerja sebagai tindak lanjut atas berbagai rekomendasi evaluasi dari Kementerian PANRB. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi kinerja sehingga setiap perangkat daerah memiliki arah kerja yang semakin selaras dalam mendukung target pembangunan daerah. Pada akhirnya, penguatan akuntabilitas kinerja diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga memastikan setiap program dan anggaran semakin tepat sasaran. Dengan perencanaan yang lebih terarah, pelaksanaan yang terukur, serta evaluasi yang berkelanjutan, target-target pembangunan dalam RPJMD diharapkan dapat dicapai secara lebih efektif sehingga pelayanan publik terus meningkat dan manfaat pembangunan semakin dirasakan oleh masyarakat. (jsa)	
--	-------	-------	------	---	--

	26/06	Sekda	AKIP	Tidak semua hasil pembangunan dapat langsung dilihat dalam bentuk fisik. Ada pula yang dibangun melalui cara organisasi bekerja, bagaimana setiap target direncanakan, diukur, dievaluasi, lalu diperbaiki secara berkelanjutan. Karena itu, akuntabilitas kinerja bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menjadi fondasi agar setiap program dan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Sekda Anang Armunanto memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 di Ruang Rapat Wakil Bupati, Jumat (26/6/2026). Rapat diikuti Asisten Administrasi Umum Sekda, Inspektur Daerah, Kepala BPPKAD, Sekretaris Bapperida, serta Tim Evaluator AKIP Perangkat Daerah. Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasil evaluasi sebelumnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Evaluasi AKIP bukan semata mengejar peningkatan nilai, tetapi memastikan setiap sasaran, program, dan penggunaan anggaran memiliki keterkaitan yang jelas dengan hasil pembangunan yang ingin dicapai. Sejumlah hal menjadi perhatian bersama, mulai dari penyempurnaan perencanaan kinerja, penguatan indikator yang terukur, peningkatan kualitas pelaporan, optimalisasi evaluasi internal, hingga pemanfaatan aplikasi SILAKIP sebagai instrumen pemantauan dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Rapat ini juga membahas kesiapan pelaksanaan evaluasi internal AKIP Tahun 2026, penyusunan tindak lanjut atas rekomendasi Kementerian PANRB, serta penguatan koordinasi antar evaluator agar proses pembinaan di setiap perangkat daerah berjalan lebih efektif. Melalui langkah tersebut, Pemkab Grobogan menargetkan peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara bertahap dan berkelanjutan. Sebab birokrasi yang baik tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari kemampuan memastikan setiap kebijakan, anggaran, dan pelayanan benar-benar memberikan hasil yang dirasakan masyarakat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pemkabgrobogan #AKIP #SAKIP	https://www.instagram.com/p/DaDRJOTGCNN/?img_index=2
--	-------	-------	------	---	---

	26/06	Sekda	sENAM hani	Mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba tidak dimulai ketika penyalahgunaan sudah terjadi. Upaya itu tumbuh dari kepedulian yang dibangun setiap hari, melalui keluarga, sekolah, lingkungan, dan komitmen bersama untuk saling menjaga. Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2026, Sekda Anang Armunanto mendampingi Wakil Bupati Grobogan Bapak H. Sugeng Prasetyo mengikuti senam bersama yang digelar di halaman Setda Grobogan, Jumat (26/6/2026). Kegiatan tersebut juga diikuti jajaran Forkopimda Kabupaten Grobogan. Mewakili Bupati Grobogan, Wakil Bupati membacakan sambutan yang mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ancaman narkoba tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang dapat memengaruhi kesehatan, keselamatan, dan masa depan generasi muda. Melalui tema "Membangun Generasi Sehat, Cerdas dan Kuat Melalui Gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045", peringatan HANI menjadi momentum untuk memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi, rehabilitasi, serta penguatan ketahanan keluarga dan masyarakat. Dalam sambutan tersebut juga disampaikan harapan agar generasi muda terus menyalurkan energi, kreativitas, dan potensinya pada kegiatan yang positif. Di sisi lain, keluarga diharapkan semakin mempererat komunikasi dengan anak serta membangun lingkungan yang hangat sebagai benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Peringatan HANI menjadi pengingat bahwa melindungi generasi muda merupakan tanggung jawab bersama. Ketika keluarga, masyarakat, dan pemerintah berjalan seiring, upaya mewujudkan lingkungan yang Bersih Narkoba tidak hanya menjadi slogan, tetapi tumbuh menjadi budaya yang dijaga bersama. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pemkabgrobogan #HANI2026 #Bersinar		https://www.instagram.com/p/DaClCn3yLw4/
--	-------	-------	------------	--	--	---

	26/06	Sekda	Sensus	Di balik setiap kebijakan yang baik, ada data yang dikumpulkan dengan sungguh-sungguh. Data tidak disusun untuk sekadar menjadi angka dalam laporan. Ia membantu pemerintah memahami bagaimana masyarakat bekerja, berusaha, dan menggerakkan perekonomian, sehingga arah pembangunan dapat direncanakan berdasarkan kondisi yang nyata. Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Sekda Anang Armunanto didampingi Ibu Nina Anang menerima petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di kediamannya, Jumat (26/6/2026). Pendataan tersebut turut dihadiri Kepala BPS Kabupaten Grobogan, Aidzin, yang mendampingi langsung petugas sensus selama proses wawancara dan pencatatan data. Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan yang dilaksanakan BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat. Informasi yang dihimpun menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Melalui wawancara yang dilakukan petugas, berbagai informasi mengenai kegiatan usaha maupun aktivitas ekonomi dikumpulkan sesuai kondisi sebenarnya. Seluruh proses dilaksanakan dengan tetap menjunjung kerahasiaan data responden sesuai ketentuan yang berlaku. Partisipasi Sekda dalam pendataan ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan statistik yang berkualitas sekaligus mengajak masyarakat untuk memberikan data secara benar ketika petugas sensus datang berkunjung. Data yang baik tidak mengubah keadaan dengan sendirinya. Namun tanpa data yang baik, kebijakan yang tepat akan jauh lebih sulit diwujudkan. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #SensusEkonomi2026 #BPS		https://www.instagram.com/p/DaEIVUOytwG/
	29/06	Sekda	SP	Mengurus layanan akan terasa lebih mudah ketika informasi yang dibutuhkan tersedia secara jelas sejak awal. Melalui Standar Pelayanan, masyarakat dapat mengetahui berbagai informasi penting, mulai dari persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, hingga mekanisme penyampaian pengaduan. Keterbukaan informasi ini menjadi bagian dari komitmen untuk mewujudkan layanan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Sebagai wujud komitmen tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan menyediakan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan yang dapat diakses melalui QR Code pada unggahan ini. Geser slide untuk melihat informasi selengkapnya, kemudian pindai QR Code untuk mengakses dokumen Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Setda Grobogan. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #PelayananPublik #BerAKHLAK		
	29/06	Sekda	SP			
	29/06	Sekda	SP			

	29/06	Sekda	SP			
	29/06	Sekda	SP			
	29/06	Sekda	hARGANAS	Keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenal rasa aman, belajar tentang kasih sayang, dan membentuk nilai-nilai yang akan ia bawa sepanjang hidupnya. Karena itu, membangun keluarga yang kuat bukan hanya menjadi urusan di dalam rumah, tetapi juga bagian penting dalam menyiapkan generasi yang mampu menghadapi masa depan. Mewakili Bupati Grobogan Bapak Setyo Hadi, Sekda Anang Armunanto memimpin Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tahun 2026, Senin (29/6/2026), di Halaman Setda Grobogan.] Upacara diikuti jajaran Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BAPPERIDA, BPPKAD, Satpol PP, BKPSDM, Disporabudpar, dan Bakesbangpol. Pada kesempatan tersebut, Sekda membacakan sambutan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN yang mengajak masyarakat menjadikan Harganas sebagai momentum memperkuat ketahanan keluarga di tengah berbagai tantangan zaman. Melalui peringatan ini, masyarakat juga diajak memperkuat fondasi keluarga melalui pemenuhan gizi dan kesehatan anak, pendidikan karakter sejak dini, serta pengasuhan yang mampu membangun ketahanan mental agar anak siap menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa keluarga memiliki peran yang tidak tergantikan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Upaya mencegah stunting, menanamkan karakter, hingga mendampingi anak menghadapi perkembangan teknologi bermula dari pengasuhan yang hadir, komunikasi yang hangat, dan kebersamaan yang terus dijaga. Pesan itu juga mengingatkan bahwa peran ayah dan ibu tidak dapat saling menggantikan. Kehadiran keduanya, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional, menjadi bekal penting agar anak tumbuh dengan rasa percaya diri, mampu menghadapi tekanan, serta tidak mudah mencari pelarian pada hal-hal yang merugikan dirinya. Dari keluarga yang saling menguatkan akan lahir generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Karena masa depan bangsa bertumbuh dari rumah-rumah yang mampu menjadi tempat paling aman, paling hangat, dan selalu memberi ruang bagi setiap anak untuk pulang, bertumbuh, dan berkembang. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pemkabgrobogan #Harganas2026 #BerAKHLAK	https://www.instagram.com/p/DaKpWa-SASM/	

	29/06	Sekda	bpjs	Pelayanan kesehatan membutuhkan kerja sama yang terus dijaga. Sebab, di balik setiap layanan yang diterima masyarakat, ada koordinasi antarlembaga yang perlu berjalan dengan baik agar berbagai kebutuhan dapat ditangani secara lebih efektif. Dengan semangat tersebut, Sekda Anang Armunanto menerima kunjungan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus, Fahrurrozi, di ruang kerjanya, Senin (29/6/2026). Turut hadir Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Grobogan, Wisnu Sukardi. Kunjungan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi menyusul pergantian Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Sebelumnya, jabatan tersebut diemban oleh dr. Heni Riswanti. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk mempererat komunikasi serta membahas penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dan BPJS Kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan layanan kesehatan bagi masyarakat. Sekda menilai komunikasi yang terjalin secara rutin menjadi modal penting dalam membangun kolaborasi. Menurutnya, semakin sering ruang koordinasi dibangun, semakin baik pula pemahaman antarlembaga dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Melalui hubungan kerja yang terus terjaga, diharapkan koordinasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan semakin efektif sehingga berbagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih baik sesuai kebutuhan masyarakat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #BPJSKesehatan #PelayananKesehatan		https://www.instagram.com/p/DaMZ47imP4x/?img_index=2
--	-------	-------	------	---	--	---

	29/06	Sekda	IPDAN	Setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah selalu menyisakan ruang untuk dipelajari, dievaluasi, dan dikembangkan. Di situlah pengalaman di lapangan dan kajian akademik dapat saling melengkapi. Sekda Anang Armunanto menerima kunjungan Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN, Prof. Andi Pitono, di ruang kerjanya, Senin (29/6/2026). Turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat sebagai ajang silaturahmi sekaligus bertukar pandangan mengenai berbagai isu pemerintahan. Diskusi juga membahas penulisan jurnal dan makalah ilmiah yang mengangkat praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari pengembangan kajian di lingkungan akademik. Pengalaman yang diperoleh dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi bahan yang berharga untuk memperkaya kajian ilmiah. Sebaliknya, hasil pemikiran dan penelitian akademik dapat menghadirkan sudut pandang baru yang bermanfaat dalam melihat berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan. Pertemuan seperti ini menjadi ruang yang mempertemukan pengalaman dan gagasan. Ketika keduanya saling berdialog, pengetahuan tidak berhenti sebagai bahan diskusi, tetapi dapat menjadi masukan yang memperkaya praktik pemerintahan dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembagrobogan #IPDN #BerAKHLAK		https://www.instagram.com/p/DaMI6QnGIGr/?img_index=1
--	-------	-------	-------	---	--	---

	29/06	Sekda	PBB P2	Pembangunan daerah memerlukan banyak hal untuk berjalan dengan baik. Salah satunya adalah pengelolaan administrasi yang tertib agar berbagai program pemerintah dapat direncanakan dan dilaksanakan secara tepat. Karena itu, pengelolaan PBB-P2 terus dievaluasi agar pelaksanaannya di setiap wilayah dapat berjalan semakin baik. Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Percepatan Pelunasan PBB-P2 Tahun 2026 dan Penyerahan Hadiah Lomba Lunas PBB-P2 Tingkat Desa, Kelurahan, dan Kecamatan Tahun 2025 yang dihadiri Bupati Grobogan Bapak Setyo Hadi didampingi Sekda Anang Armunanto, Senin (29/6/2026). Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada desa, kelurahan, dan kecamatan yang berhasil menyelesaikan pelunasan PBB-P2 Tahun 2025. Penghargaan itu diharapkan menjadi penyemangat untuk terus menjaga komitmen dan sinergi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing wilayah. Bupati juga mengajak seluruh camat, lurah, dan kepala desa memperkuat komunikasi dan koordinasi sehingga pelaksanaan PBB-P2 Tahun 2026 dapat berjalan lebih baik sejak awal. Selanjutnya, Sekda memaparkan perkembangan realisasi PBB-P2 Tahun 2026 sebagai bahan evaluasi bersama. Melalui pemetaan capaian di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi wilayah yang masih memerlukan pendampingan sehingga tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Paparan tersebut juga menyoroti beberapa hal yang perlu terus diperkuat, mulai dari memastikan SPPT telah diterima masyarakat, memperbarui data apabila terdapat perubahan objek pajak, hingga meningkatkan koordinasi antartingkatan pemerintahan agar berbagai kendala administrasi dapat diselesaikan lebih awal. Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, diharapkan pengelolaan PBB-P2 semakin tertib sehingga pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah dapat berjalan sesuai perencanaan. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #PBBP2 #BerAKHLAK		https://www.instagram.com/p/DaMNdtLy82-/
--	-------	-------	--------	--	--	---

	29/06	Sekda	bAPENDA	Setiap perubahan kebijakan membutuhkan ruang untuk menyamakan pemahaman dan langkah di lapangan. Karena itu, komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terus diperkuat agar pelaksanaannya dapat berjalan selaras dengan kebutuhan daerah. Sekda Anang Armunanto mendampingi Bupati Grobogan Bapak Setyo Hadi menerima audiensi Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah di Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan, Senin (29/6/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi penanganan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor berbasis kewilayahan seiring perubahan mekanisme pengelolaan pendapatan daerah setelah berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berbagai perkembangan di lapangan turut menjadi perhatian, mulai dari perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak, perlunya penyampaian informasi yang tepat kepada masyarakat, hingga penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan unsur kewilayahan lainnya agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Audiensi ini juga menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan, termasuk penguatan kolaborasi, pemanfaatan teknologi pendukung, serta penyelarasan peran masing-masing pihak sesuai kewenangannya. Melalui komunikasi yang terus dibangun, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten diharapkan dapat semakin solid dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Dengan langkah yang selaras, pelaksanaan kebijakan diharapkan berjalan lebih baik sekaligus memberikan kepastian pelayanan administrasi yang semakin mudah bagi masyarakat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #JawaTengah #BerAKHLAK		https://www.instagram.com/p/DaK9IdSGDor/?img_index=2
--	-------	-------	---------	--	--	---

	30/06	Sekda	pARIPURNA	Jawaban pemerintah daerah atas berbagai pandangan fraksi DPRD menjadi tahapan penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, sekaligus ruang untuk menyampaikan penjelasan dan tindak lanjut atas berbagai masukan yang disampaikan. Dalam agenda tersebut, Sekda Anang Armunanto menghadiri Rapat Paripurna ke-13 DPRD Kabupaten Grobogan yang membahas Pembicaraan Tingkat I Tahap Ketiga, yakni penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025, Selasa (30/6/2026), di Gedung Paripurna DPRD Grobogan. Dalam jawaban yang disampaikan, Bupati Grobogan Bapak Setyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai saran, masukan, dan pandangan yang diberikan selama pembahasan. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bagian dari upaya menyamakan persepsi dalam mewujudkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan. Pemerintah daerah juga memberikan penjelasan mengenai sejumlah komponen pendapatan dan belanja daerah yang memengaruhi capaian APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk beberapa faktor yang mendorong peningkatan pendapatan maupun penyesuaian realisasi belanja. Selain itu, perhatian juga diberikan pada hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SD dan SMP. Pemerintah Kabupaten Grobogan menyiapkan langkah perbaikan melalui identifikasi wilayah yang masih memerlukan pendampingan, penguatan strategi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, hingga pendampingan yang lebih terarah bagi satuan pendidikan. Melalui pembahasan ini, pemerintah daerah berharap setiap masukan yang berkembang dalam proses legislasi dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan program, sehingga tata kelola pemerintahan semakin akuntabel dan manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #DPRDGrobogan #BerAKHLAK		https://www.instagram.com/p/DaOzmesmOfV/?img_index=1
--	-------	-------	-----------	--	--	---

	30/06	Sekda	sk pensiun	Ada masa ketika seseorang mengawali pengabdian dengan mesin ketik di atas meja kerja. Lalu mengikuti berbagai perubahan zaman, beradaptasi dengan teknologi, hingga akhirnya menutup perjalanan dinas di era pelayanan yang serba digital. Perjalanan panjang itulah yang menjadi bagian dari dedikasi puluhan Aparatur Sipil Negara dalam melayani masyarakat. Bupati Grobogan Bapak Setyo Hadi didampingi Sekda Anang Armunanto menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pensiun secara digital kepada Pegawai Negeri Sipil dengan TMT 1 September 2026 dan 1 Oktober 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, Selasa (30/6/2026), di Pendapa Kabupaten Grobogan. Sebanyak 52 PNS menerima SK pensiun sebagai penanda berakhirnya masa tugas setelah mengabdikan selama bertahun-tahun di berbagai bidang pelayanan pemerintahan. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas loyalitas serta pengabdian yang telah diberikan. Menurutnya, masa pensiun bukanlah akhir dari kontribusi, melainkan babak baru untuk menikmati waktu bersama keluarga, menjaga kesehatan, dan tetap berkarya di tengah masyarakat sesuai kemampuan masing-masing. Bupati juga berharap silaturahmi yang telah terjalin selama bertugas tetap terpelihara. Pengalaman, keteladanan, dan nilai-nilai baik yang dibangun selama menjadi ASN diharapkan terus menjadi inspirasi, sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Setiap masa pengabdian memang memiliki akhirnya. Namun dedikasi, pengalaman, dan jejak kebaikan yang ditinggalkan akan tetap menjadi bagian dari perjalanan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam melayani masyarakat. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #ASNBerAKHLAK #PensiunASN		https://www.instagram.com/p/DaNHye-GLpr/?img_index=1
--	-------	-------	------------	---	--	---

	30/06	Sekda	Rakor LP2B dkk	Setiap program pembangunan memerlukan berbagai persiapan sebelum dapat dilaksanakan. Selain perencanaan, penyiapan lahan, kesesuaian tata ruang, serta kelengkapan dokumen menjadi bagian penting agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Sekda Anang Armunanto memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah perangkat daerah, Kantor ATR/BPN Kabupaten Grobogan, dan Perum Perhutani KPH Purwodadi di Ruang Rapat Sekda, Selasa (30/6/2026). Salah satu pembahasan difokuskan pada tindak lanjut penyiapan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Berbagai persyaratan administrasi maupun teknis dibahas bersama agar proses pengajuan dapat dipersiapkan secara menyeluruh sesuai kewenangan masing-masing instansi. Rapat juga membahas perkembangan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelarasan dokumen penataan ruang yang meliputi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dan Lahan Baku Sawah (LBS), serta perkembangan rencana penataan kawasan TPA Ngembak yang saat ini memasuki tahapan pengumpulan data dan studi kelayakan. Selain itu, usulan pembangunan jalan nasional dan infrastruktur jalan daerah turut menjadi bagian dari pembahasan lintas perangkat daerah. Melalui forum tersebut, masing-masing instansi menyampaikan perkembangan sesuai bidangnya sekaligus menyepakati langkah lanjutan yang perlu dilakukan. Koordinasi sejak tahap penyiapan diharapkan membuat setiap proses berjalan lebih selaras, sehingga berbagai program pembangunan dapat dipersiapkan secara matang dan dilaksanakan sesuai perencanaan. #sekdagrobogan #setdagrobogan #pembkabgrobogan #BerAKHLAK #Grobogan	https://www.instagram.com/p/DaO_hnMGCjk/?img_index=1
--	-------	-------	----------------	---	---